

# Pengembangan Desa Wisata Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Desa

## Development of Tourism Villages from the Perspective of Increasing Village Income

Adelia Damayanti<sup>1\*</sup>, Deden Syarifudin<sup>2</sup>, Apriadi Budi Raharja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan

### Info Artikel

Artikel Masuk : 21/01/2026

Artikel Diterima : 06/05/2026

Tersedia Online : 13/05/2026

### Kata kunci :

*Desa Wisata,  
Pendapatan Desa, dan  
Potensi Desa.*

### Keyword :

*Tourism Villages,  
Village Income, and  
Village Potential.*

### Abstrak

Lingkungan pedesaan memiliki potensi alam dan budaya besar, meski tren masyarakat lebih condong ke perkotaan. Potensi pariwisata desa bisa menjadi produk ekonomi yang meningkatkan daya saing dan Pendapatan Asli Desa (PADes), seperti melalui desa wisata. Desa Lamajang di Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan kebijakan daerah, dengan peluang menggerakkan ekonomi lokal. Namun, statusnya masih rintisan sehingga belum jadi prioritas pemerintah. Penelitian ini menganalisis pengembangan usaha pariwisata untuk meningkatkan pendapatan desa menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Analisis deskriptif kualitatif mengidentifikasi unit usaha eksisting dan peluang usaha baru yang sesuai potensi desa, serta menilai peluang usaha berdasarkan atraksi wisata dengan skala Likert. Hasil menunjukkan peluang usaha wisata sangat penting dan berdampak besar pada Pendapatan Asli Desa Lamajang.

### Abstract

*Rural environments possess significant natural and cultural potential, despite the growing urbanization trend. Village tourism has the potential to become an economic product that increases competitiveness and Village Original Income (PADes), for example through village tourism. Lamajang Village in Bandung Regency was designated a tourist village by regional policy, offering the potential to stimulate the local economy. However, its status is still in its infancy and has not yet become a government priority. This study analyzes the development of tourism businesses to increase village income using qualitative methods through observation and interviews. Qualitative descriptive analysis identifies existing businesses and new business opportunities that align with the village's potential, and assesses business opportunities based on tourist attractions using a Likert scale. The results indicate that tourism business opportunities are very important and have a significant impact on Lamajang Village's Original Income.*

<sup>1</sup> [adeliadamayanti01@gmail.com](mailto:adeliadamayanti01@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber perekonomian serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional adalah sektor pariwisata. Dalam lima tahun terakhir, khususnya di Kabupaten Bandung, sektor jasa pariwisata menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yang ditandai dengan dominasi lapangan usaha pada sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran (BPS, 2022). Sektor pariwisata berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring perkembangannya, pariwisata mengalami perluasan tren, mulai dari pariwisata massal (mass tourism) hingga wisata alternatif (alternative tourism) (Zahrotun Satriawati et al., 2023). Perubahan tren tersebut turut dipengaruhi oleh perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi Covid-19 yang menggeser preferensi wisatawan terhadap kebutuhan dan karakter destinasi wisata (Yu et al., 2023).

Suatu objek wisata berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan daerah apabila mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah besar (Ritzkal et al., 2018). Dalam memilih destinasi, wisatawan cenderung mempertimbangkan faktor jarak, kesehatan, kemudahan mobilitas, serta kondisi geografis, sehingga satu destinasi diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan (Bursa et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata yang memperhatikan aspek kebersihan dan pengendalian kepadatan pengunjung menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata (Yu et al., 2023). Sejalan dengan berkembangnya tren pariwisata tersebut, salah satu bentuk pengembangan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat diwujudkan melalui pengembangan desa wisata.

Desa wisata merupakan wilayah perdesaan yang memiliki potensi daya tarik wisata, baik berupa potensi fisik lingkungan alam maupun kearifan lokal, dengan karakter kepadatan penduduk yang relatif rendah sehingga menjadi alternatif destinasi wisata yang diminati wisatawan. Kondisi fisik geografis, keindahan dan keaslian lanskap, serta kebiasaan budaya masyarakat lokal menjadi daya tarik khas wisata pedesaan (Reni Vitasurya et al., 2018). Desa wisata juga mencerminkan keaslian kehidupan pedesaan yang terlihat dari aspek sosial ekonomi, budaya, adat istiadat, serta aktivitas keseharian masyarakat (Rahmayani et al., 2022). Pengembangan desa wisata merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan citra serta menambah keunggulan desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki (Assiyah, 2008).

Sebagai bentuk pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, desa wisata berperan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kemandirian dan pengurangan kemiskinan (Tukiman & Ertien, 2019). Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi melalui pengelolaan wilayah yang disesuaikan dengan potensi serta kemampuan masyarakatnya (Gurning et al., 2022). Wisata pedesaan saat ini juga menjadi sarana bagi wisatawan untuk menikmati, mengeksplorasi, serta mempelajari nilai-nilai baru dari lingkungan masyarakat lokal (Sanagustín Fons et al., 2011). Pengembangan desa wisata terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam peningkatan pendapatan (Aminuddin et al., 2022). Selain itu, keberadaan desa wisata membuka peluang bagi pertanian skala kecil yang memiliki

keterbatasan daya saing dalam menghadapi globalisasi pasar (Goebel et al., 2012 dalam Ionela, Constantin, & Dogaru, 2015).

Kehadiran desa wisata sebagai destinasi yang mengintegrasikan wisata alam pedesaan dengan tradisi lokal mampu menarik minat wisatawan (Pujaastawa & I.N. Astan, 2015). Pengembangan desa wisata juga didorong oleh pemerintah sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi melalui produk unggulan desa yang mampu menciptakan lapangan kerja baru (Steven Pike & Chris Ryan, 2004). Selain meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah, destinasi desa wisata juga memberikan pengalaman dan suasana baru bagi wisatawan (Judith Mair & Leo Jago, 2010). Peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal berkontribusi terhadap penguatan ekonomi keluarga sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan pendapatan desa (Pebriani et al., 2022).

Keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata memiliki nilai budaya pedesaan yang tinggi tanpa menghilangkan keasliannya, serta memiliki potensi ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Desa wisata juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Darwita I K & Redana D N, 2018). Pengembangan desa wisata didasarkan pada pengelolaan fasilitas lokal, peningkatan manfaat ekonomi komunitas, pemberdayaan usaha kecil, keterlibatan masyarakat, serta pengembangan produk wisata yang memiliki karakteristik khas (Surahman et al., 2020). Desa wisata dipahami sebagai suatu ekosistem yang saling berkaitan, sehingga pengembangannya memerlukan pendekatan terpadu dalam mengidentifikasi potensi, kelemahan, dan keunggulan desa untuk menetapkan produk unggulan sebagai daya tarik utama (Wirdayanti et al., 2021).

Pedoman desa wisata yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menegaskan bahwa pengembangan desa wisata harus disertai konsep wisata edukasi, yaitu integrasi antara wisata rekreasi dan kegiatan pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi wisatawan (edutainment) (Encang Saepudin et al., 2019). Nuryanti (dalam Edwin, 2015:154) mendefinisikan desa wisata sebagai integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan adat dan tradisi lokal. Pengembangan desa wisata akan berjalan optimal apabila didukung oleh keterlibatan penuh masyarakat lokal yang bersinergi dengan pemerintah dan sektor swasta (Wearing & Donald, 2001).

Desa Lamajang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata edukasi karena telah ditetapkan sebagai desa wisata unggulan nasional oleh Kementerian Pariwisata, dengan memenuhi kriteria desa wisata meliputi atraksi, amenities, aksesibilitas, dan kelembagaan (Kemenpar, 2021). Dengan potensi tersebut, Desa Wisata Lamajang memiliki peluang dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun demikian, status Desa Lamajang yang masih berada pada kategori

desa wisata rintisan menyebabkan pengembangannya belum menjadi prioritas pemerintah (Faizal Hamada & Gina Puspitasari, 2022).

Untuk menggerakkan desa wisata agar mampu mensejahterakan masyarakat, diperlukan analisis pengembangan unit usaha yang dapat menggambarkan alur peningkatan pendapatan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis pengembangan unit usaha dalam meningkatkan pendapatan desa.

## 2. Data Dan Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian berupa deskriptif. Paradigma yang digunakan yaitu menggunakan paradigma participatory atau pendekatan partisipatif yang merupakan salah satu cara untuk merumuskan kebutuhan partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan pengembangan unit usaha dalam meningkatkan pendapatan desa. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, maka kategori penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan induktif dan narrative research.

### 2.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dilakukan yaitu melalui survei lapangan dan observasi dengan mengamati kondisi eksisting desa wisata. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang merupakan key informan untuk mengetahui informasi terkait potensi Desa Wisata Lamajang, kelembagaan, serta sumber pendapatan Desa Lamajang. Teknik pemilihan narasumber menggunakan purposive sampling. Dengan menggunakan purposive sampling, maka narasumber yang ditetapkan yaitu Kepala Desa Lamajang, Ketua Pokdarwis Desa Lamajang, dan Karang Taruna Desa Lamajang.

### 2.2 Metode Analisis Data

Metode ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan diagram alurir atau flowchart untuk menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian ini dan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis skoring skala Likert. Analisis skoring skala Likert digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan pengembangan peluang usaha berdasarkan atraksi wisata. Perhitungan skoring dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang pengukurannya sebagai berikut (Riduwan, 2009).

- a. Skor 4 untuk jawaban sangat berdampak.
- b. Skor 3 untuk jawaban berdampak.
- c. Skor 2 untuk jawaban tidak berdampak.
- d. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak berdampak.

Setelah semua jawaban responden terkumpul, dilakukan penjumlahan atas seluruh jawaban responden dari masing-masing kategori. Hasil penjumlahan dari tiap kategori dikalikan dengan bobot skor yang telah ditetapkan. Pengalihan tersebut dapat dilihat pada rumus berikut:

Dimana:

T : jumlah responden yang memilih

Pn : bobot skor Likert

Setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan rumus diatas, kemudian dilakukan penjumlahan secara keseluruhan. Kemudian melakukan perhitungan indeks persentase untuk mengetahui hasil jawaban berdasarkan persentase. Setelah mendapatkan indeks persentase, maka dilakukan penghitungan panjang kelas interval. Panjang kelas interval untuk mengetahui tingkat kepentingan pengembangan peluang usaha berdasarkan atraksi wisata. Untuk mengetahui nilai maksimal, nilai minimal, panjang kelas interval, dan persentase skor, berikut adalah urutannya (Riduwan, 2009).

- Nilai maksimal : skor tertinggi x jumlah responden
- Nilai minimal : skor terendah x jumlah responden
- Panjang interval :  $100 : \text{jumlah skor (Likert)}$
- Persentase skor :  $(\text{total skor} : \text{nilai maksimal}) \times 100$

Dengan kriteria interpretasi skor seperti berikut:

- Persentase 0% - 25% = sangat rendah
- Persentase 26% - 50% = rendah
- Persentase 51% - 75% = tinggi
- Persentase 76% - 100% = sangat tinggi

Penelitian dilakukan secara observasi untuk mengidentifikasi sumber pendapatan desa. Kemudian observasi dilakukan untuk mengidentifikasi unit usaha Desa Lamajang untuk menggambarkan kondisi eksisting lapangan yang kemudian dilakukan analisis pengembangan potensi unit usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Kemudian untuk mendapatkan informasi dilakukan wawancara kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Lamajang, Karang Taruna Desa Lamajang, dan pelaku usaha. Proses analisis data dilakukan dengan menelaah data yang sudah didapatkan berdasarkan observasi dan wawancara yang kemudian digambarkan dalam diagram alur penelitian. Kemudian hasil analisis dijabarkan dalam bentuk tabel dan grafik yang dinarasikan secara deskriptif. Dan bagian akhir dalam penelitian ini yaitu pembuatan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

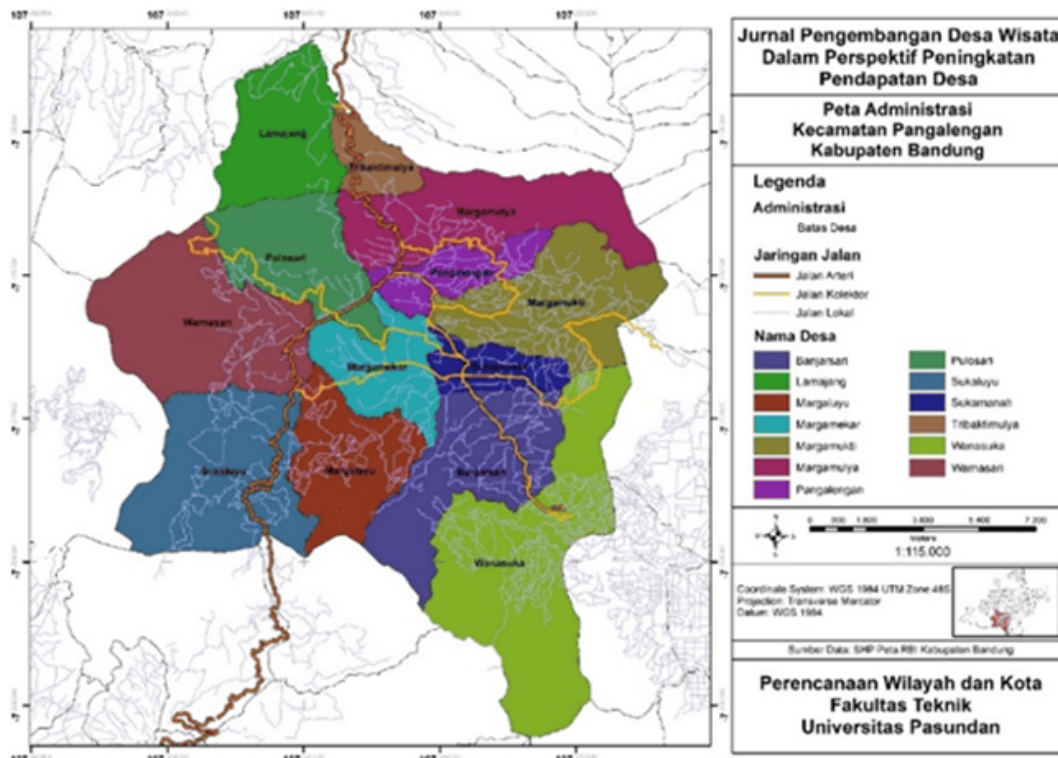
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa menyebutkan dalam pasal 9 ayat 2 bahwa pendapatan desa terdiri atas tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 9 ayat 3 dimana kelompok PADesa terdiri atas Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa. Dalam pasal 9 ayat 4 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam hasil usaha desa yaitu Hasil Bumdes.

Desa Wisata Lamajang merupakan salah satu desa wisata berkategori rintisan yang diresmikan pada tahun 2022. Terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Desa Wisata Lamajang memiliki luas wilayah 4.016,091 Ha dengan ketinggian 900-1.200 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 20°-23° celsius (Arsip Desa Wisata Lamajang). Desa Lamajang berbatasan di utara dengan Desa Sukamaju, di selatan dengan Desa Pulosari, di barat berbatasan dengan Desa Cikalong dan Tribaktimulya

**Gambar 1.** Peta Administrasi Desa Wisata Lamajang

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, didapatkan hasil analisis unit usaha berdasarkan beberapa atraksi wisata berdasarkan urgensi pengembangan seperti Fajar Alam, Bale Paseban, Situs Batu Eon, Rumah Adat Cikondang, Hutan Larangan, dan Wisata Trekking Gadog Namburu. Analisis peluang pengembangan usaha dilakukan melalui penyebaran angket dengan pembobotan menggunakan skala Likert.

**Tabel 1.** Tingkat kepentingan pengembangan peluang usaha berdasarkan atraksi wisata melalui penyebaran angket

Sumber: Hasil analisis, 2023

Atraksi	Peluang Pengembangan Usaha	Narasumber				Total Skor*	Persentase **	Kategori
		Pokdarwis	Karang Taruna	Bu Lina (Pelaku Usaha)	Bu Nur (Pelaku Usaha)			
	Paket Wisata Desa	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
Fajar Alam	Tiket masuk	SB	SB	B	B	14	88%	Sangat Tinggi
	Pemandu Wisata	SB	SB	B	B	14	88%	Sangat Tinggi

Atraksi	Peluang Pengembangan Usaha	Narasumber				Total Skor*	Persentase **	Kategori
		Pokdarwis	Karang Taruna	Bu Lina (Pelaku Usaha)	Bu Nur (Pelaku Usaha)			
	Sewa Alat dan Lahan <i>Camping</i>	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
	Warung makan	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
	<i>Bazaar</i> UMKM	B	B	SB	SB	14	88%	Sangat Tinggi
	Penyewaan tempat	SB	B	STB	STB	9	56%	Tinggi
Bale	Sanggar seni	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
Paseban	Pertunjukan Kesenian	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
Situs Batu Eon	Paket Wisata	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
	<i>Tour Guide</i>	B	B	B	B	12	75%	Tinggi
	Sewa Lahan <i>Camping</i>	STB	STB	STB	STB	4	25%	Sangat Rendah
Rumah Adat Cikondang	Paket Wisata	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
Hutan Larangan	Paket Wisata	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
Wisata Hiking Gadog	Paket wisata	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
	Tani hutan agrowisata kopi	SB	SB	SB	SB	16	100%	Sangat Tinggi
Nambru	Agrowisata Tanaman Obat	SB	SB	B	B	14	88%	Sangat Tinggi

Keterangan:

\*Hasil penjumlahan dari perkalian antara bobot skor dengan jumlah responden yang memilih

\*\*Hasil perkalian antara persentase dengan pembagian antara total skor dan nilai maksimal

Berdasarkan hasil analisis skoring Skala Likert didapatkan jawaban bahwa tingkat kepentingan pengembangan peluang usaha berdasarkan atraksi wisata didominasi oleh kategori sangat tinggi. Dengan peluang pengembangan tertinggi yaitu paket wisata desa. Paket wisata merupakan produk wisata yang berisi rencana perjalanan beserta harga yang telah ditetapkan untuk biaya fasilitas atraksi wisata (Darmajati, 2001). Paket wisata Desa Lamajang meliputi paket kegiatan harian dengan pilihan atraksi wisata serta fasilitas seperti pemandu wisata, penginapan, dan paket makanan.

### 1. Fajar Alam

Fajar alam memiliki potensi sebagai objek wisata karena menawarkan panorama alam Desa Lamajang yang mempesona. Wisatawan dapat melihat keindahan alam Desa Lamajang yang berada di kaki Gunung Tilu. Fajar Alam memiliki beberapa ketersediaan fasilitas yang dibangun untuk kenyamanan dan memanjakan wisatawan, antara lain gedung pertemuan, mushola, toilet, spot foto, warung makan, lahan perkemahan, hingga lahan parkir.

**Gambar 2.** Fajar AlamSumber: Hasil Observasi, 2023

---

**2. Bale Paseban**

Bale Paseban merupakan sebuah gubuk atau pondok sederhana yang memiliki nilai sejarah. Bale Paseban dapat dijadikan tempat untuk menyambut wisatawan yang datang. Tak hanya itu, Bale Paseban juga dijadikan sebagai tempat pertemuan masyarakat Desa Lamajang ketika ada hal-hal tertentu.

**Gambar 3.** Bale PasebanSumber: Hasil Observasi, 2023

---

**3. Situs Batu Eon**

Situs Batu Eon merupakan objek wisata yang memiliki keunikan tersendiri, dimana berdasarkan sejarah Batu Eon adalah sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Hal itu membuat Batu Eon kemudian diabadikan dan dijadikan sebagai objek wisata di Desa Lamajang.

**Gambar 4.** Situs Batu Eon  
Sumber: Hasil Observasi, 2023



#### 4. Rumah Adat Cikondang

Rumah Adat Cikondang merupakan sebuah rumah dengan bangunan sederhana yang terbuat dari bambu, kayu, dan ijuk. Rumah Adat Cikondang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adat masyarakat Desa Lamajang dan tempat menyimpan peralatan kegiatan adat tersebut. Rumah Adat Cikondang juga digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat dan tempat penyambutan wisatawan.

**Gambar 5.** Rumah Adat Cikondang  
Sumber: Hasil Observasi, 2023



#### 5. Hutan Larangan

Hutan Larangan di Desa Lamajang merupakan area hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Hutan ini hanya diperbolehkan diambil pepohonannya bagi masyarakat Kampung Cikondang sehingga masyarakat atau wisatawan dari luar dilarang untuk memasuki area hutan tersebut. Terdapat mitos tersendiri apabila orang dengan sembarangan masuk ke area hutan. Namun, maksud lain dari tidak diperbolehkannya wisatawan masuk ke area hutan adalah untuk menjaga kelestarian dari hutan tersebut. Selain itu, di area hutan ini terdapat makam keramat Uyut Pameget dan Uyut Istri selaku sesepuh dari Desa Lamajang.

**Gambar 6.** Hutan Larangan

Sumber: Hasil Observasi, 2023

**6. Wisata Hiking Gadog Nambro**

Gadog Nambro merupakan wisata hiking menuju hutan pinus yang terdapat sumber mata air yang mengairi Desa Lamajang. Sumber mata air tersebut juga mengairi wilayah agrowisata Tani Hutan pohon kopi.

**Gambar 7.** Gadog Nambro

Sumber: Hasil Observasi, 2023

**Tabel 2.** Identifikasi Peluang Pengembangan Unit Usaha Dari Kegiatan Pariwisata

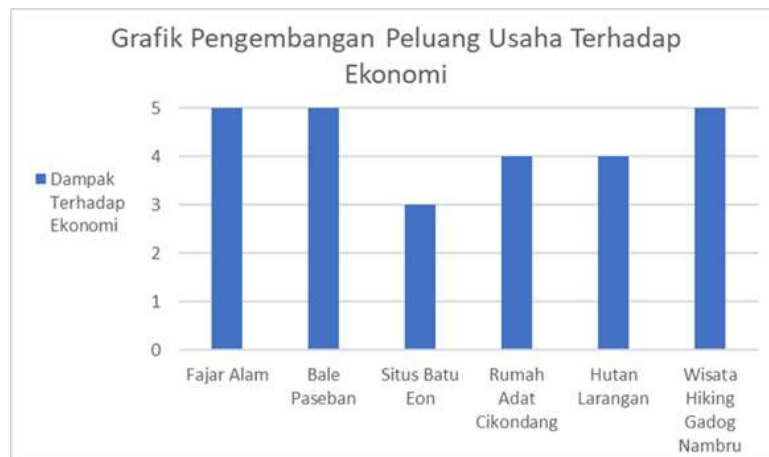
Sumber: Hasil analisis, 2023

	Efek Langsung	Efek tidak langsung	Efek turunan
Fajar Alam	Paket wisata Pemandu wisata Tiket masuk Warung makan Sewa tempat camping	Produksi makanan & minuman. Sewa alat camping Sewa lahan	Kegiatan Bazaar UMKM Kegiatan piknik/gathering Lahan kunjungan kegiatan organisasi/mahasiswa
Bale Paseban	Paket wisata Pemandu wisata	Wisata edukasi budaya dan kesenian	Sebagai tempat pertemuan dengan wisatawan
Situs Batu Eon	Paket wisata Pemandu wisata	Wisata edukasi sejarah	Sebagai objek wisata

	Efek Langsung	Efek tidak langsung	Efek turunan
Rumah Adat Cikondang	Paket wisata Pemandu wisata	Wisata edukasi sejarah dan budaya Sebagai cagar budaya	Sebagai lokasi penelitian
Hutan Larangan	Paket wisata Pemandu wisata	Wisata edukasi sejarah dan budaya	Sebagai lokasi penelitian
Wisata Hiking Gadog Namburu	Paket wisata Pemandu wisata Hiking	Agrowisata Kolaborasi Lembaga Masyarakat Sadar Lingkungan	Penjualan hasil pertanian Pembibitan dan penghijauan pohon

**Gambar 8.** Grafik Pengembangan Usaha Terhadap Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Berdasarkan grafik diatas, dalam pengembangan peluang usaha pada Desa Wisata Lamajang diketahui bahwa atraksi wisata Fajar Alam, Bale Paseban, serta Wisata Hiking Gadong Namburu menjadi atraksi dengan urgensi paling tinggi untuk dikembangkan yang dapat menunjang pendapatan ekonomi masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dalam pengembangan desa wisata terdapat potensi yang bisa dikembangkan pada desa wisata tersebut. Potensi yang dimaksud adalah pengembangan unit usaha masyarakat desa dari atraksi yang telah tersedia dalam pengembangan desa wisata. Unit usaha masyarakat Desa Wisata Lamajang diantaranya berupa paket wisata, tour guide, warung makan, hingga penyewaan tempat dan lahan. Unit usaha tersebut termasuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan tentu berpotensi untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan desa, sehingga mampu untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat Desa Wisata Lamajang.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kepada masyarakat desa untuk dapat mengoptimalkan potensi peningkatan pendapatan desa dari berbagai atraksi wisata yang telah tersedia. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengarahan tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih

mandiri dalam mengelola berbagai usaha dalam upaya peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan ekonom.

## Referensi

### A. Buku Teks dan Jurnal

- Aminuddin, Haris, Faza Dhora Nailufar, and M Alexander Mujiburrohman. 2022. "Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat." *Journal of Public Power* 6 (2): 76–84. <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6102>.
- Assiyah, R. (2008). Potensidan pengembangan wisata desa ngablak di sleman yogyakarta. Skripsi. Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret.
- Darmajati, R. S. (2001). *Istilah – Istilah Dunia Pariwisata*.
- Darwita I K, & Redana D N. (2018). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Locus 9*.
- Edwin, Gamar. 2015. Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata Dikecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif* Vol 3, No. 1.
- Encang Saepudin, Agung Budiono, & Mas Halimah. (2019). PENGEMBANGAN DESA WISATA PENDIDIKAN DI DESA CIBODAS, KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21, No. 1, 1–10.
- Gurning, D. J., Sinaga, J. H., Sitorus, M., Ginting, N. S., Napitu, R., Munthe, R. N., & Parinduri, T. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Di Desa Wisata Kecamatan Hariara Pohan, Samosir. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 806–812. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.2014>.
- Ionela, G.-P., Constantin, B. M., & Dogaru, L.-D. (2015). Advantages and Limits for Tourism Development in Rural Area (Case Study Ampoi and Mureş Valleys). *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 1050–1059. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01567-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01567-1)
- Judith Mair, & Leo Jago. (2010). The Development of a Conceptual Model of Greening in the Business Tourism Sector. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 18 No. 1.
- Pebriani, R. A., Sari, R., & Hendarmin, R. M. R. (2022). Keuangan Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Sembawa Masa Ppkm Covid-19. 6(September), 1387–1392.
- Pujaastawa, I. B. G., & I.N. Astan. (2015). Pedoman Identifikasi Daya Tarik Wisata. *Pustaka Larasan Kerjasama Konsorsium Riset Pariwisata Universitas Udayana*.
- Rahmayani, D., Yuliani, R., Kristanti, N. R., Marpaung, G. N., Supriyadi, A., & Nuurfauzi, M. (2022). Peningkatan Kapabilitas Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 171–178.
- Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. PT. Alfabeta.
- Ritzkal, Karbella, M., & Amalia, N. R. (2018). Pengembangan Objek Wisata Curug Saderi Dan Camping Ground Di Desa Ciasmara. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.193>

- Steven Pike, & Chris Ryan. (2004). "Destination Positioning Analysis through a Comparison of Cognitive, Affective and Conative Perceptions," *Journal of Travel Research*, 42, 333–342.
- Surahman, T., Sudiarta, N., Suwena, K., Wisata, P., & Pariwisata, F. (2020). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Lokal Desa Wisata Sasak Ende, Lombok. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 20(1)
- Tukiman, Ertien, A. (2019). DOMPYONG KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK Tukiman Prodi Ilmu Administrasi Negara , Universitas UPN " Veteran " Jawa Timur , Ertien Rining N Prodi Ilmu Administrasi Negara , Universitas UPN " Veteran " Jawa Timur Andre Yusuf Trisna Prodi Teknologi. *Journal of Public Sector Innovations*, 4(1).
- Wearing, S. L., & Donald, M. (2001). The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationship between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities. *Journal of Sustainable Tourism*.
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., & Hartoyo, D. R. (2021). Pedoman Desa Wisata (A. Wirdayanti & V. Ariani (eds.); Edisi II). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
- Zahrotun Satriawati, Hendi Prasetyo, & Novi Irawati. (2023). KAJIAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP PARIWISATA ALTERNATIF DAN WISATA PEDESAAN MELALUI GOOGLE TRENDS. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 17 Nomor 1, 18–26.

## **B. Dokumen dan Peraturan**

Kemenpar. (2021). *Desa Lamajang sebagai Desa Wisata Andalan Nasional*.

# Tata Kelola Air Minum Berbasis Komunitas untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Kontribusi Program PAMSIMAS terhadap Capaian SDGs di Desa Sawarna

## Community-Based Drinking Water Governance for Sustainable Village Development: An Analysis of the Contribution of the PAMSIMAS Program to SDG Achievements in Sawarna Village

Rachmandha Zanna Aura<sup>1\*</sup>, Budi Heri Pirngadi<sup>2</sup>, Deden Syarifudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan

### Info Artikel

Artikel Masuk : 23/01/2026  
 Artikel Diterima : 06/05/2026  
 Tersedia Online : 13/05/2026

### Kata kunci :

*Pamsimas,  
 Pembangunan Desa, dan  
 Sustainable Development Goals*

### Keyword :

*Pamsimas,  
 Village Development, and  
 Sustainable Development Goals*

### Abstrak

Pembangunan desa diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas hidup, serta pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur perdesaan, khususnya pada sektor penyediaan air minum, pemerintah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebagai wujud komitmen terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Desa Sawarna ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena arah kebijakan pembangunan desanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Pengumpulan Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Primer yang meliputi Observasi, Wawancara dan Kuisisioner dengan jumlah 100 responden serta Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dengan mengunjungi instansi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Program PAMSIMAS di Desa Sawarna berjalan dengan cukup efektif dan mampu meningkatkan cakupan pelayanan air minum baik sebelum maupun setelah program dilaksanakan. Capaian akses aman air minum berdasarkan indikator SDGs tercatat sebesar 79,63%, serta keberadaan program ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan desa melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

### Abstract

*Village development is directed at encouraging increased community welfare, improving the quality of life, and reducing poverty levels. In order to support the development of rural infrastructure, particularly in the drinking water supply sector, the government is implementing the Community-Based Drinking Water and Sanitation Program (PAMSIMAS) as a form of commitment to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) targets. Sawarna Village was designated as the research location because the direction of its village development policy emphasizes meeting the need for clean water. This research used Primary data collection methods including Observation, Interviews and Questionnaires with a total of 100 respondents as well as Secondary Data Collection conducted by visiting related agencies. The results of the study indicate that the implementation of the PAMSIMAS Program in Sawarna Village was quite effective and was able to increase the coverage of drinking water services both before and after the program was implemented. The achievement of safe access to drinking water based on SDGs indicators was recorded at 79.63%, and the existence of this program has made a real contribution to village development by improving clean and healthy living behaviors in the community.*

<sup>1</sup> [araerzeta99@gmail.com](mailto:araerzeta99@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan mencakup aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, aspek lingkungan kerap terabaikan sehingga memicu terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Perhatian dunia terhadap permasalahan lingkungan mulai menguat sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Stockholm pada tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan penetapan Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 dan kemudian diteruskan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) (Wahyuningsih, 2018). Pembangunan desa dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam proses perencanaan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Ariadi, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya pengembangan sarana dan prasarana perdesaan pada sektor air minum dilaksanakan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yaitu program penyediaan layanan air minum dan sanitasi perdesaan yang menerapkan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Kebijakan PAMSIMAS diarahkan untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, memperluas akses air minum dan sanitasi berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaannya (Asmara et al., 2020). Program ini dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 (Miolo et al., 2020). Air dan sanitasi merupakan dua komponen yang saling berkaitan karena penggunaan air bersih dalam aktivitas sehari-hari akan menghasilkan air limbah, sehingga pengelolaan air minum tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sanitasi (Elysia, 2018). Indonesia sendiri telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi (Hidayati et al., 2020). Kompleksitas sistem penyediaan air di negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu dipahami melalui visualisasi hubungan antar variabel dan simulasi kuantitatif. Pendekatan ini membantu meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan seperti pengelola air, pembuat kebijakan, dan masyarakat agar dapat merancang dan mengimplementasikan program penyediaan air yang lebih efektif (Daniel et al., 2021).

Air merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh makhluk hidup yang harus terpenuhi dari aspek kuantitas dan kualitas, dengan sumber utama berasal dari air tanah dan air permukaan (Mawardi, 2014). Kebutuhan air didefinisikan sebagai volume air yang diperlukan secara layak untuk kebutuhan domestik dan aktivitas lainnya, yang menjadi dasar dalam penentuan kapasitas sistem berdasarkan tingkat pemakaian air (Abdi & Utomo, 2019). Ketepatan cakupan layanan PAMSIMAS dapat dinilai melalui persentase rumah tangga penerima layanan serta proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak (Chusniati, 2018).

Saat ini, Program PAMSIMAS telah memasuki tahap ketiga (PAMSIMAS III) yang berfokus pada dukungan pencapaian agenda nasional, yaitu 100% akses air minum dan 100%

akses sanitasi layak, khususnya bagi masyarakat perdesaan dan peri-urban yang belum terlayani (Pamsimas.org). Keberhasilan program ini ditunjukkan oleh tingginya partisipasi masyarakat, meskipun masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan kemandirian dan keswadayaan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap pemerintah masih cukup tinggi (Marulis, 2020). Pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan capaian sektor air minum dan sanitasi pasca MDGs dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 guna mencapai target 100% akses bagi seluruh penduduk. Upaya tersebut didukung melalui pelatihan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi, rasa memiliki, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan air bersih dan sanitasi (Pratama et al., 2018).

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari MDGs terdiri atas 17 tujuan yang saling terintegrasi dan saling memperkuat, salah satunya Tujuan ke-6 yang berfokus pada penyediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dengan target 100% akses pada tahun 2030 (United Nation Development Programme; Ishatono & Raharjo, 2016). SDGs menjadi kerangka pembangunan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Patiung, 2019).

Di Kabupaten Lebak, pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Multatuli masih memiliki cakupan rendah, yaitu 14,46%, dengan jangkauan 18 dari 28 kecamatan atau 86 dari 350 desa/kelurahan (RPJMD Kabupaten Lebak 2019–2024). Kabupaten Lebak juga menerima Program PAMSIMAS yang dilanjutkan dengan pembentukan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) pascakonstruksi untuk mengelola layanan air minum berbasis masyarakat. Kecamatan Bayah sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWp) dalam RTRW Provinsi Banten 2010–2030, dengan fungsi utama perdagangan, jasa, permukiman, pariwisata, dan pelayanan sosial ekonomi. Pertumbuhan aktivitas pariwisata dan industri di wilayah ini meningkatkan kebutuhan air minum.

Selain dilayani oleh PDAM Tirta Multatuli, Kecamatan Bayah juga menerima Program PAMSIMAS dengan keberadaan empat BP-SPAMS, salah satunya berada di Desa Sawarna yang menjadi lokasi penelitian. Desa Sawarna dipilih karena BP-SPAMS di desa tersebut merupakan yang paling baru didirikan (2013), masih relevan untuk dikaji, serta memiliki posisi strategis sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) bidang pariwisata dalam RTRW Provinsi Banten 2010–2030. Arah kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan energi dan air bersih, serta selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Lebak 2005–2025 "*Lebak Menjadi Daerah yang Maju dan Religius Berbasis Perdesaan*", mendorong penelitian ini untuk mengkaji implikasi Program PAMSIMAS dan peran BP-SPAMS terhadap pembangunan desa dalam mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

## 2. Data Dan Metode

### 2.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*). Pendekatan ini mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian (Creswell, 2014).

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui data primer yang meliputi observasi, wawancara, dan kuesioner dengan jumlah 100 responden, serta data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait melalui pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk proses analisis.

### 2.3 Metode Analisis

Penilaian implementasi Program PAMSIMAS dan kinerja BP-SPAMS dilakukan secara deskriptif evaluatif menggunakan teknik skoring berbasis Skala Likert. Selanjutnya, pengaruh BP-SPAMS terhadap perubahan tingkat pelayanan air minum dianalisis berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014, dengan perhitungan tingkat pelayanan air minum menggunakan persamaan tertentu :

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk Total}} \times 100\%$$

Pengaruh BP-SPAMS terhadap perubahan tingkat pelayanan air minum dianalisis dengan metode deskriptif komparatif. Selanjutnya, capaian akses aman air minum diukur berdasarkan indikator pertama target pertama TPB/SDGs ke-6, yaitu persentase rumah tangga pengguna layanan air minum yang dikelola secara aman, yang dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{PAMSA} = \frac{\text{JRTAMSA}}{\text{JRT}} \times 100$$

Keterangan :

PAMSA : Persentase rumah tangga pemakai layanan air bersih terkelola aman, berada di dalam/halaman rumah, dan tersedia terus-menerus.

JRTAMSA : Jumlah rumah tangga pemakai layanan air bersih terkelola aman, berada di dalam/halaman rumah, dan tersedia terus-menerus.

JRT : Total jumlah rumah tangga.

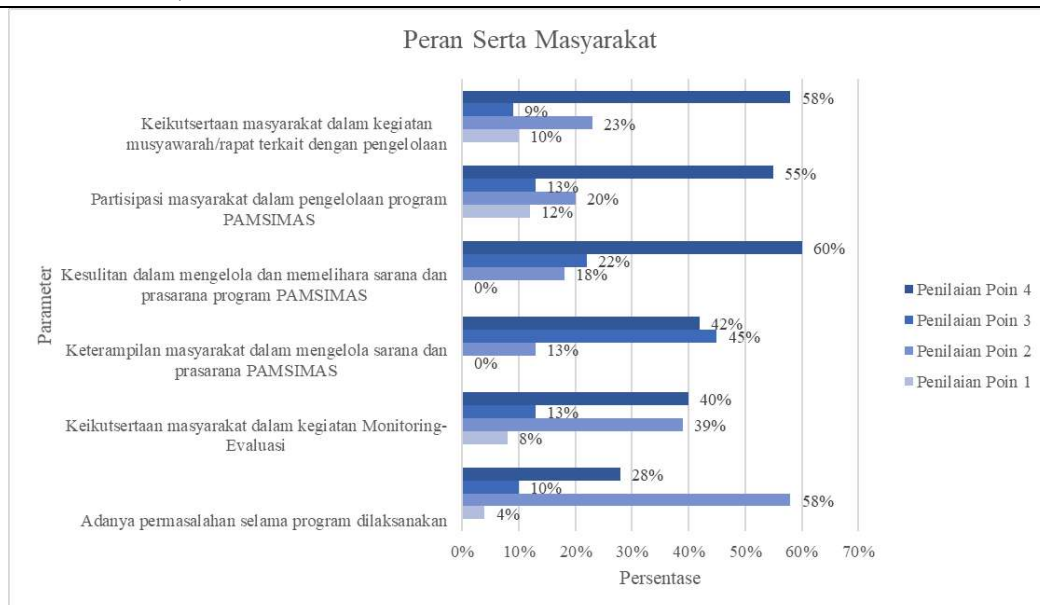
Analisis implikasi Program PAMSIMAS terhadap pembangunan Desa Sawarna dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan strategi terpadu dan menyeluruh menurut Adisasmita (2018), yang meliputi tujuh variabel: tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, arus komunikasi, tempat prakarsa, dan indikator prestasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

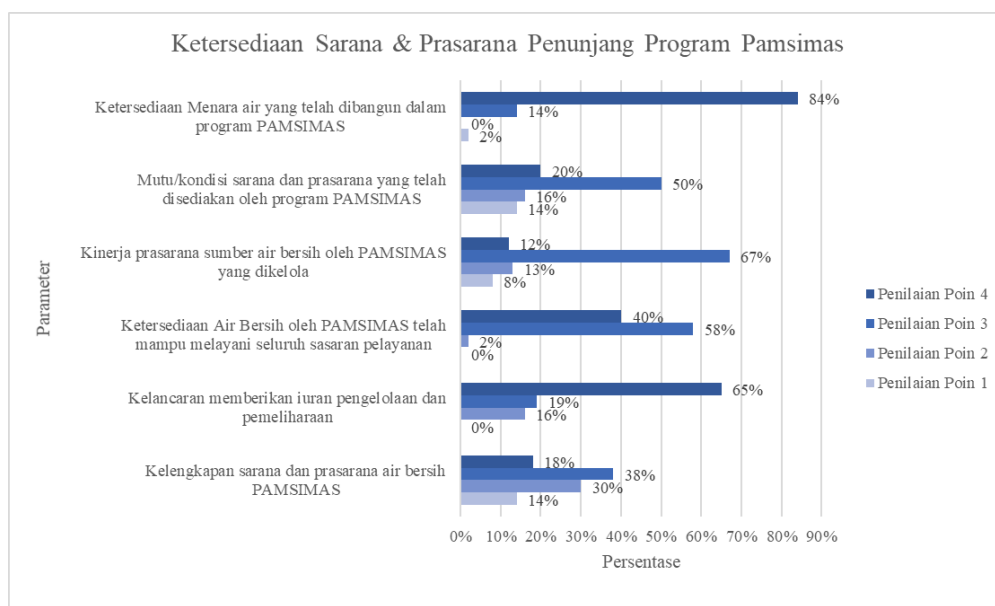
#### 3.1. Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Perubahan Cakupan Pelayanan Air Minum Oleh Badan Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP\_SPAMS)

Penilaian program Pamsimas dilaksanakan via kuesioner ke 100 responden dari penerima manfaat, mengevaluasi kriteria Partisipasi Masyarakat dan Ketersediaan Fasilitas Pendukung berdasarkan pandangan warga. Tabel dan grafik selanjutnya menampilkan hasil analisis pengelolaan Pamsimas.

**Gambar 1.** Persentase Indikator Peran Serta Masyarakat dalam evaluasi program Pamsimas  
Sumber : Hasil analisis, 2021



**Gambar 2.** Persentase Indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program Pamsimas  
Sumber: Hasil analisis, 2021



#### A. Peran Serta Masyarakat

1. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah terkait dengan pengelolaan. Sebanyak 58% Masyarakat Desa Sawarna mengaku selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut, musyawarah atau rapat biasa dilakukan ketika terdapat permasalahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana penunjang Air Minum dan tidak harus selalu dilakukan secara rutin, kegiatan musyawarah atau rapat ini biasanya diselenggarakan di majelis – majelis setiap RT/RW.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. dengan tingkat partisipasi sebesar 55% dari total masyarakat Desa Sawarna mengaku selalu berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana penunjang Air Minum, namun ada juga yang jarang berpartisipasi bahkan tidak pernah sama sekali, yaitu sebanyak 20% dan 12% masyarakat Desa Sawarna, hal ini diakibatkan oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Pamsimas ini adalah program Pemerintah.
3. Kesulitan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dengan persentase sebesar 60% masyarakat Desa Sawarna menjawab tidak sulit, karena pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat hanya pada pipa atau selang yang berada di sekitar rumah.
4. Keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana PAMSIMAS. Jawaban didominasi oleh kriteria Sangat Terampil dan Cukup Terampil yaitu masing-masing sebesar 42% dan 45%, karena tidak merasa adanya kesulitan dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana Air Minum tersebut.
5. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Monitoring-Evaluasi. Sebanyak 40% masyarakat Desa Sawarna selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut dan 39% masyarakat jarang ikut serta, hal ini dikarenakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang tidak rutin dilaksanakan dan kesibukan masing-masing masyarakat yang berbeda.
6. Adanya permasalahan selama program dilaksanakan. Sebanyak 58% masyarakat desa Sawarna merasakan adanya permasalahan yang jarang terjadi, permasalahan ini biasanya terjadi ketika musim hujan tiba, yang menyebabkan kualitas air menjadi sedikit keruh dan terdapat endapan.

#### B. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program Pamsimas

1. Ketersediaan Menara air yang telah dibangun dalam program PAMSIMAS. Sebanyak 84% masyarakat Desa Sawarna mengetahui keberadaan Menara Air yang telah dibangun dengan kondisi yang baik, namun terdapat 2% masyarakat Desa Sawarna yang tidak mengetahui ketersediaan Menara Air dalam program Pamsimas.
2. Mutu atau kondisi sarana dan prasarana yang telah disediakan, Jawaban masyarakat didominasi oleh kondisi Baik dan Sangat Baik, yaitu Baik 50% dan Sangat Baik 20%, karena sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan Menara Air dengan kondisi yang baik, selain itu kondisi pipa atau selang yang terlihat langsung oleh masyarakat juga memiliki kondisi yang baik.
3. Kinerja prasarana sumber air bersih oleh PAMSIMAS yang dikelola. Sebanyak 67% masyarakat Desa Sawarna berpendapat bahwa kinerja dari Prasarana Sumber Air Bersih tersebut Baik, hal ini dikarenakan mutu dan kondisi sarana dan prasarana yang telah disediakan dinilai baik sehingga kinerja prasarana tersebut pun dinilai baik, dan untuk pengelolaan serta pemeliharannya dianggap tidak sulit Adapun ketika terjadi permasalahan seperti tersendatnya aliran air pada pipa atau selang,

Badan Pengelola akan menangani permasalahan tersebut begitu menerima laporan dari masyarakat.

4. Ketersediaan Air Bersih telah mampu melayani seluruh sasaran pelayanan. Sebanyak 58% masyarakat Desa Sawarna berpendapat bahwa sasaran dari program Pamsimas belum seluruhnya terlayani, karena tidak semua masyarakat di Desa Sawarna menggunakan Air Minum yang disediakan oleh Pamsimas, sebagian ada yang menggunakan sumur, dan beberapa masyarakat enggan menggunakan air minum yang disediakan oleh Pamsimas karena merasa keberatan dengan biaya awal memasang pipa atau selang dan keberatan dengan tarif yang diberlakukan.
5. Kelancaran memberikan iuran pengelolaan dan pemeliharaan. Lancar adalah jawaban yang mendominasi, yaitu sebesar 65%, masyarakat merasa lancar memberikan iuran bulanan kepada Badan Pengelola karena Badan Pengelola secara langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan uang iuran. Masyarakat lainnya menjawab cukup lancar sebanyak 19% dan kurang lancar 16%, yang menilai bahwa tidak semua warga patuh terhadap tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.
6. Kelengkapan sarana dan prasarana air bersih. Jawaban masyarakat bervariasi, namun penilaian terbanyak ada pada jawaban Lengkap dengan persentase 38%, karena masyarakat sudah merasa cukup dengan sarana dan prasarana air bersih yang ada, begitupun dengan 18% masyarakat yang menjawab sangat lengkap dan 30% masyarakat yang menjawab cukup lengkap. Adapun 14% masyarakat lainnya menjawab sarana dan prasarana air bersih yang disediakan oleh pamsimas tidak lengkap karena masyarakat menganggap perlu adanya bak penampungan yang lebih kecil didekat rumah masyarakat agar masyarakat yang baru menggunakan pamsimas tidak asal memasang pipa atau selang pada pipa yang telah ada sehingga memotong aliran air masyarakat yang lainnya sehingga debit yang diterima menjadi kecil.

**Gambar 3.** Bangunan Hidran Umum

Sumber: Hasil observasi, 2021



**Gambar 4.** Pipa Distribusi

Sumber: Hasil observasi, 2021



Saat ini, masyarakat Desa Sawarna mendapat akses air bersih yang bersumber dari Mata Air, Sumur dan Sungai. Adapun Jumlah Penduduk dan Pemanfaat Air Bersih Desa Sawarna sebelum dan setelah adanya Program Pamsimas adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Jumlah penduduk dan KK sebelum dan setelah adanya Program Pamsimas

Sumber: Proposal Desa/Kelurahan Untuk Paket Pamsimas HIK dan Puskesmas Kecamatan Bayah 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Pengakses Air Aman (KK)
1	2012 (Sebelum adanya Program Pamsimas)	4.286	1.072	156
2	2021 (Setelah adanya Program Pamsimas)	4.407	1.316	903

Penghitungan tingkat pelayanan air minum dilakukan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mengidentifikasi dampak BP-SPAMS terhadap perubahan layanan tersebut).

#### A. Cakupan Pelayanan Air Minum sebelum adanya Program Pamsimas

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk Total}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{156}{1.072} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pelayanan} = 0,145522388 \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pelayanan} = 14,55\%$$

#### B. Cakupan Pelayanan Air Minum setelah adanya Program Pamsimas

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk Total}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{903}{1.316} \times 100\%$$

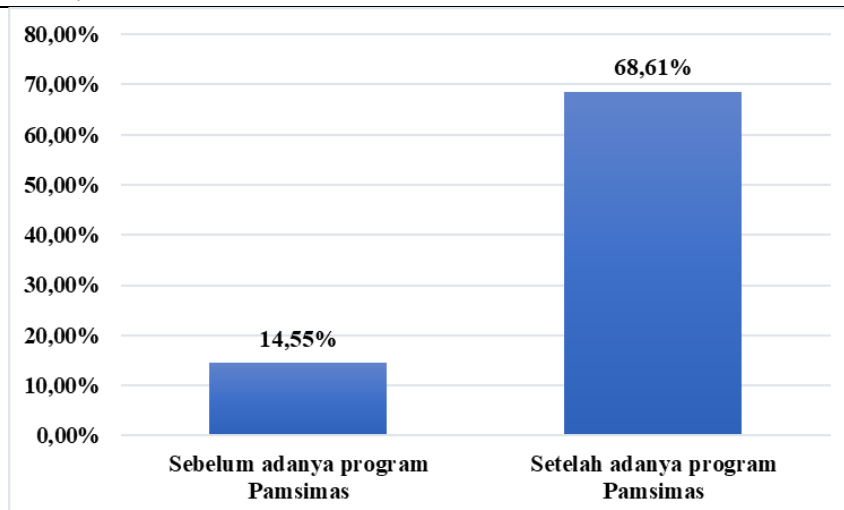
$$\text{Tingkat Pelayanan} = 0,68617021277 \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pelayanan} = 68,61\%$$

Cakupan layanan air minum di Desa Sawarna mengalami peningkatan signifikan sebelum dan sesudah Program Pamsimas yang dikelola BP-SPAMS, dari 14,55% (tahun 2012) menjadi 68,61% saat ini. Grafik berikut membandingkan cakupan pelayanan air minum pra- dan pasca-Pamsimas:

**Gambar 5.** Grafik perbandingan cakupan pelayanan air minum di Desa Sawarna

Sumber: Hasil Analisis, 2021



### 3.2. Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Perubahan Cakupan Pelayanan Air Minum Oleh Badan Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP\_SPAMS)

Berdasarkan data cakupan keluarga menurut sumber air minum yang digunakan yang diperoleh dari Puskesmas Bayah, jumlah pengguna sarana air minum berdasarkan sumber air minum dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.** Jumlah dan persentase akses air minum

Sumber: Puskesmas Kecamatan Bayah, 2021

No	Sumber Air Minum	Jumlah Pengguna (KK)
1	Sumur Bor / Jet Pump	228
2	Sumur Terlindung	160
3	Mata Air Terlindung	660
Jumlah KK Pengguna Sumber Air Minum Aman		1.048

Adapun kualitas Air dari mulai Hidran Umum, Bak Penampungan dan rumah masyarakat adalah sebagai berikut :

**Gambar 6.** Kualitas air  
Sumber: Hasil observasi, 2021



Perhitungan Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman, adapun Perhitungan Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman di Desa Sawarna adalah :

$$\text{PAMSA} = \frac{\text{JRTAMSA}}{\text{JRT}} \times 100$$

$$\text{PAMSA} = \frac{1.048}{1.316} \times 100$$

$$\text{PAMSA} = 0,796352584 \times 100$$

$$\text{PAMSA} = 79,63525836$$

$$\text{PAMSA} = 79,63 \%$$

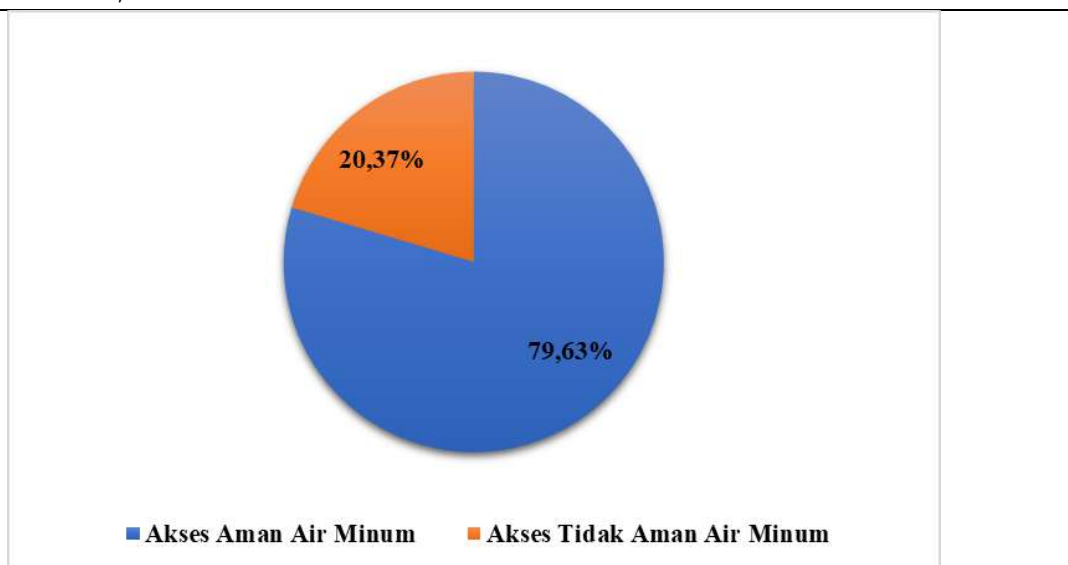
Sebanyak 79,63% rumah tangga di Desa Sawarna telah memanfaatkan layanan air minum terkelola aman, sedangkan 20,37% sisanya belum memiliki akses aman. Kondisi ini menandakan bahwa indikator TPB 6.1 SDGs—target 100% akses air minum aman, merata, dan terjangkau hingga 2030—belum tercapai penuh di Desa Sawarna saat ini. Capaian ini dapat dikategorikan sebagai tingkat sedang menuju tinggi, karena telah melampaui separuh populasi, namun masih belum mencapai kondisi ideal.

Jika dibandingkan dengan standar nasional, capaian ini tergolong cukup baik, mengingat target akses air minum aman di Indonesia secara bertahap ditingkatkan menuju universal access. Namun demikian, dalam kerangka global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target SDG 6.1 yang menargetkan 100% akses air minum aman pada tahun 2030, capaian Desa Sawarna masih tergolong belum optimal (relatif rendah terhadap target global).

Selisih sebesar 20,37% rumah tangga yang belum terlayani menunjukkan masih adanya kesenjangan akses yang perlu ditangani, baik melalui peningkatan infrastruktur, penguatan kelembagaan pengelola, maupun perluasan jangkauan layanan. Dengan demikian, meskipun program PAMSIMAS telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses air minum, diperlukan upaya lanjutan agar capaian tersebut dapat memenuhi standar universal yang ditetapkan dalam SDGs.

**Gambar 7.** Grafik persentase ketersediaan air minum dalam program *Sustainable Development Goals (SDG's)* di Desa Sawarna

Sumber: Hasil Analisis, 2021



### 3.3. Analisis Implikasi Program Pamsimas Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Sawarna

#### A. Tujuan

Program Pamsimas di Desa Sawarna, semula dikelola oleh BUMDes dengan membentuk BP-SPAMS (Badan Penyedia Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi), dan saat ini dikelola oleh masing-masing RW memiliki tujuan untuk memberikan air bersih untuk masyarakat dan meningkatkan Pembangunan Desa melalui penambahan pendapatan keuangan desa serta kesejahteraan masyarakat terhadap kecukupan akses air bersih. Saat ini, Program Pamsimas di Desa Sawarna mampu untuk melakukan penyediaan air minum, karena dibantu dengan keberlanjutan program tersebut dengan dibentuknya Badan Pengelola walaupun pada akhirnya berganti kepengurusan, Program Pamsimas di Desa Sawarna belum mampu memberikan kontribusi keuangan Desa karena pendapatan dari hasil penyediaan air minum dialokasikan untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta upah anggota pengurus, namun jumlah masyarakat yang mendapat akses aman air minum sebagaimana tercantum pada tujuan Pedoman Umum Program Pamsimas tahun 2016, mengalami peningkatan dari sebelum adanya program Pamsimas.

#### B. Sasaran

Strategi pembangunan Desa Sawarna yang dilaksanakan melalui Program PAMSIMAS dirancang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program ini menargetkan seluruh rumah tangga di Desa Sawarna sebagai penerima manfaat, dengan prioritas utama diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pada pelaksanaannya belum merata, masih banyak warga yang dikategorikan mampu secara perekonomian yang ikut menggunakan pelayanan air minum dari program Pamsimas. Program Pamsimas di Desa Sawarna belum mampu memberikan kontribusi keuangan Desa karena pendapatan dari hasil penyediaan air minum dialokasikan untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta upah anggota pengurus.

### C. Lingkup

Program Pamsimas diharapkan memperluas akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat miskin perdesaan. Namun, saat ini program tersebut belum berkontribusi langsung pada pendapatan desa karena dana difokuskan untuk operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan insentif pengelola. Meski begitu, di Desa Sawarna, program ini meningkatkan perilaku hidup bersih-sehat via pemberdayaan masyarakat, terbukti dari penurunan kasus diare di Kabupaten Lebak dari 4,40% (2011) menjadi 3,62% (2020).

### D. Koordinasi

Perkembangan organisasi Pamsimas hingga saat ini masih perlu diperhatikan, karena belum semua Badan Pengelola memiliki rantai koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) "Tanjung Layar", kemudian dilanjutkan oleh masing-masing RW, pada koordinasinya dengan Pemerintah Desa mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya bantuan dari Pemerintah Desa untuk turut menangani permasalahan yang terjadi.

### E. Arus Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahap sosialisasi awal Program PAMSIMAS kepada masyarakat lebih menekankan pada komunikasi formal yang bersifat edukatif, yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber air guna mendukung pola hidup sehat. Sementara itu, komunikasi informal dilakukan secara persuasif melalui pendekatan sosial untuk menarik minat masyarakat agar berpartisipasi dalam penggunaan layanan distribusi air bersih.

### F. Tempat Prakarsa

Pemerintah Desa Sawarna belum mampu menyediakan tempat Prakarsa untuk pengurus program Pamsimas, hingga saat ini, tempat pengurus untuk berkumpul dan bertukar informasi masih dilakukan di rumah-rumah pengurus. Untuk keberlanjutan BP-SPAMS, dimana saat ini pengelolanya adalah masing-masing RW, selalu dilakukan di rumah Ketua RW dan jika ada permasalahan dan memerlukan bantuan masyarakat, untuk sosialisasinya masyarakat dikumpulkan di musholla untuk dapat mengetahui informasi yang diberikan oleh pengurus.

### G. Indikator Prestasi

Indeks prestasi Program PAMSIMAS di Desa Sawarna menunjukkan kemampuan program dalam menjawab permasalahan strategis di wilayah perdesaan. Pencapaian indikator prestasi ditunjukkan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat pengguna PAMSIMAS. Pengelolaan program telah berjalan cukup baik, ditandai dengan peran Pemerintah Desa yang mengutus Ketua RW serta meresmikan KP-SPAMS sebagai lembaga pengelola yang bertugas mengatur dan memperbaiki sistem distribusi air bersih ke rumah warga. Pendapatan yang diperoleh dialokasikan untuk pembayaran upah pengurus serta pengembangan layanan pendistribusian air bersih di Desa Sawarna. Program PAMSIMAS

menjadi solusi penting bagi masyarakat Desa Sawarna, khususnya sebelum tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan oleh PDAM dan bagi warga yang tidak memiliki sumber air mandiri.

#### 4. Kesimpulan

Program PAMSIMAS di Desa Sawarna menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan partisipasi masyarakat tinggi dan peningkatan cakupan layanan dari 14,55% (2012) menjadi 69,25% (2021), serta akses air minum aman mencapai 79,63%. Namun, capaian ini masih belum memenuhi target universal dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) karena masih terdapat 20,37% rumah tangga yang belum terlayani, disertai kendala pada ketepatan sasaran, kontribusi ekonomi desa, dan koordinasi kelembagaan.

Pemerintah desa perlu memperluas layanan bagi rumah tangga yang belum terlayani, memperbaiki penentuan sasaran agar lebih tepat, serta memperkuat koordinasi dengan BP-SPAMS. Selain itu, pengelolaan keuangan perlu dioptimalkan agar berkontribusi pada pendapatan desa dan didukung dengan penyediaan fasilitas operasional bagi pengelola.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji keberlanjutan program dari aspek finansial, kelembagaan, dan lingkungan secara lebih komprehensif. Kajian tambahan mengenai dampak sosial dan kesehatan masyarakat juga penting untuk melihat sejauh mana program berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, serta dapat dilengkapi dengan studi komparatif antar wilayah guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan program air berbasis masyarakat.

#### Referensi

##### A. Buku Teks dan Jurnal

- Abdi, S., & Utomo, S. (2019). Sistem Pelayanan Air Bersih Di Perumahan Pucang Gading Dalam Mendukung Tercapainya Sustainable Development Goals. . . Prosiding SENDI\_U 2019, 2018, 978-979.
- Adisasmita, R, 2018, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan Edisi 2*, Expert, Yogyakarta.
- Ariadi, A, 2019, "Perencanaan Pembangunan Desa", Vol.2, No.2, Hal. 135-147, Meraja Journal, Makassar.
- Asmara, M., Yanfika, H., & Wijayanti, G. M. (2020). Tingkat Keberhasilan dan Strategi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sidodadi. *Journal of Planning And Policy Development*, 1(1), pp. 1-13.
- Chusniati, S. (2018). Implementasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2).
- Creswell, JW, 2014, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publication Inc., United States of America.
- Daniel, D., Prawira, J., Al Djono, T. P., Subandriyo, S., Rezagama, A., & Purwanto, A. (Tahun). A system dynamics model of the community-based rural drinking water supply program (PAMSIMAS) in Indonesia.
- Elysia, V. (2018). Air Dan Sanitasi: Dimana Posisi Indonesia? Universitas Terbuka.
- Evans, B & Mara D, 2015, *Sanitation and Water Supply in Low-Income Countries*, Inggris.

- French, D & Kotze, LJ, 2018, *Sustainable Development Goals : Law, Theory and Implementation*, Edward Elgar Publishing Inc., Amerika Serikat.
- Hidayati, L.A., Suleman, Z. & Dyawati, Y. 2020. Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). *Jurnal Media Sosiologibidang Ilmu Sosial*. 23(1). 1-10.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share Social Work Journal*, 6(2), 181612.
- Machado, AVM, Santos, JAN, Quindeler, N & Alves, MNC, 2019, '*Critical Factors for the Success of Rural Water Supply Services in Brazil*', Basel, Switzerland.
- Marulis, T. S. ( 2020). partisipasi masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Pekbis Jurnal*, Vol.12, No.3, 248- 259.
- Mawardi, M. (2014). Air Dan Masa Depan Kehidupan. *Jurnal Tarjih*, 12(1), 131–142.
- Miolo, M., Kasim, N.M. & Tijow, L.M. 2020. Pengaturan Hukum Tentang Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). *Gorontalo Law Review*. 3(2). 153-167.
- Patiung, M. (2019). Analisis permasalahan, isu strategis dan kebijakan pembangunan sDGS kabupaten mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 19(1).
- Pratama, A. B., & Isnani, A. T. (2018). Evaluasi Berjalan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 15(2), 148–162.
- Rao, PV, 2005, *Water Supply Engineering (For the Course of Water Supply and Sanitary Engineering)*, State Institute of Vocational Education, Hyderabad, India.
- Swastomo, A.S & Iskandar, D. A, 2020, "*Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan Berbasis Masyarakat*", *Jurnal Litbang Sukowati In Press*, Vol. 4, No. 2, Hal 12-25, Yogyakarta.
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium develompent goals (Mdgs) Dan sustainable development goals (Sdgs) dalam kesejahteraan sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390–399.

## **B. Dokumen dan Peraturan**

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024  
Pedoman Umum Program Pamsimas Tahun 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## **C. Website**

- United Nation Development Programme 2020, Sustainable Development Goals, dilihat 21 Desember 2021, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>

# Transformasi Ruang Dan Masyarakat: Evaluasi Dampak Perumahan Terhadap Perubahan Lahan Dan Sosial-Ekonomi

## Transformation Of Space And Society: Evaluation Of The Impact Of Housing On Land Use And Socio-Economic Change

Ramdan Assidiq Dwiantono<sup>1\*</sup>, Deden Syarifudin<sup>2</sup>, Ratih Rantini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan

### Info Artikel

Artikel Masuk : 27/01/2026

Artikel Diterima : 06/05/2026

Tersedia Online : 13/05/2026

### Kata kunci :

*Dampak Perumahan,  
Perubahan Lahan, dan  
Perubahan Sosial Ekonomi*

### Keyword :

*Housing Impact,  
Land Use Change, and  
Socioeconomic Change*

### Abstrak

Kawasan permukiman di Kecamatan Arjasari, termasuk Perumahan Grand Cendana Residence di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu, menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji konversi lahan akibat pembangunan perumahan, kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek fisik-spasial dan belum mengintegrasikan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks perumahan formal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara terpadu pengaruh pembangunan perumahan Grand Cendana Residence terhadap perubahan penggunaan lahan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan melalui teknik spasial, tumpang susun peta (*overlapping maps*), serta perhitungan koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa perumahan dibangun pada lahan datar (0–8%) dengan batuan aluvial dan berada di luar kawasan rawan bencana. Perubahan lahan mencapai 13 Ha, didominasi konversi sawah sebesar 6,47 Ha. Dari sisi sosial-ekonomi, pengaruh terhadap kondisi sosial sebesar 11,6% dan ekonomi sebesar 56,1%. Penelitian ini merekomendasikan agar pembangunan perumahan tidak memanfaatkan lahan sawah produktif serta tetap menjaga interaksi sosial masyarakat.

### Abstract

*Residential areas in Arjasari District, including the Grand Cendana Residence housing development located in Lebakwangi and Wargaluyu Villages, have shown significant growth. Although numerous studies have examined land conversion resulting from housing development, most of them primarily focus on physical-spatial aspects and have not yet integrated their impacts on the socioeconomic conditions of communities, particularly in the context of formal housing. Therefore, this study aims to comprehensively analyze the impact of the Grand Cendana Residence development on land use change and the socioeconomic conditions of the community using a quantitative descriptive approach. The analysis was conducted using spatial techniques, map overlay methods, and coefficient of determination calculations. The results indicate that the housing area was developed on flat land (0–8% slope) with alluvial soil characteristics and is located outside disaster-prone areas. The total land use change reached 13 hectares, predominantly from the conversion of paddy fields amounting to 6.47 hectares. In terms of socioeconomic aspects, the development contributed 11.6% to social changes and 56.1% to economic conditions. This study recommends that housing development should avoid the use of productive agricultural land and encourages the maintenance of social interactions within the community.*

<sup>1</sup> ramdanassidiqdwiantono22@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Menurut UU RI No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, perumahan merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas unit hunian yang dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum, serta kegiatan pendukung, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam praktiknya, pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sering dihadapkan pada masalah konversi lahan, khususnya di wilayah perkotaan, sebagai dampak keterbatasan ruang dan meningkatnya jumlah penduduk yang mendorong ekspansi kegiatan ke kawasan pinggiran kota (suburban) (Citra Ayu Erwanasari, 2014). Perumahan formal didefinisikan sebagai kawasan hunian yang dibangun dengan aturan, bentuk, dan pola yang seragam tanpa perbedaan jenis bangunan (Fadilla et al., 2017). Meskipun konsep perumahan dan permukiman telah diatur secara komprehensif dalam kebijakan nasional serta berbagai penelitian telah mengkaji fenomena konversi lahan akibat pengembangan kawasan perumahan, kajian yang ada umumnya masih berfokus pada aspek fisik dan spasial, seperti perubahan penggunaan lahan dan ekspansi kawasan perkotaan. Di sisi lain, penelitian mengenai dampak sosial-ekonomi dari perkembangan perumahan cenderung dilakukan secara terpisah dan belum terintegrasi dengan analisis perubahan ruang. Selain itu, perumahan formal sebagai bentuk pembangunan yang terstruktur dan seragam belum banyak dikaji dalam kaitannya dengan transformasi ruang dan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penelitian dalam mengkaji secara terpadu hubungan antara perkembangan perumahan, perubahan penggunaan lahan, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat dalam kerangka transformasi ruang dan masyarakat.

Alih fungsi lahan mengubah struktur ruang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peluang usaha dan tenaga kerja, serta dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur (Dewi et al., 2015; Wardhana et al., 2020). Kesesuaian lahan penting untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti degradasi (Jaya et al., 2020). Meski menunjukkan keterkaitan aspek spasial, ekonomi, dan lingkungan, penelitian sebelumnya masih parsial dan belum mengkaji dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh dalam konteks perumahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan terpadu antara perkembangan perumahan, perubahan penggunaan lahan, dan dinamika sosial-ekonomi. Perubahan lahan pertanian yang cepat berisiko mengancam ketahanan pangan (Prasada et al., 2018) dan menurunkan pendapatan petani (Afrizal, 2017; Sudirman et al., 2020). Secara konseptual, alih fungsi lahan adalah perubahan dari pertanian ke non-pertanian (Janah et al., 2017), yang berperan dalam pembangunan ekonomi, namun berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim (Zhihui Zhang et al., 2023).

Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan memiliki posisi strategis sebagai kawasan pengembangan permukiman. Lingkungan perdesaan yang relatif nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk kota mendorong masyarakat perkotaan untuk memilih tinggal di kawasan pinggiran kota, sehingga pembangunan perumahan di wilayah ini terus berkembang (Erin Fitriani, 2016). Dampak

pembangunan perumahan di Kabupaten Bandung tercermin dari perubahan penggunaan lahan non-terbangun, khususnya di Kecamatan Arjasari. Data menunjukkan bahwa luas lahan sawah pada tahun 2015 mencapai 2.660,00 Ha (Kecamatan Arjasari Dalam Angka, 2015), kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 1.370,60 Ha pada tahun 2020 (Kecamatan Arjasari Dalam Angka, 2020). Dengan demikian, dalam periode lima tahun terjadi pengurangan lahan sawah seluas 1.289,40 Ha di Kecamatan Arjasari. Perubahan ini mengindikasikan adanya pergeseran fungsi lahan dari sektor pertanian menuju penggunaan non-pertanian (Kees, 2018 dalam Aris Munandar, 2019). Lahan pertanian yang sebelumnya produktif kerap berubah menjadi kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur, sehingga berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan (Fuadina et al., 2020). Lahan persawahan yang berada di sekitar kawasan perkotaan merupakan jenis lahan yang paling rentan mengalami alih fungsi karena lokasinya yang strategis (Dewi et al., 2020).

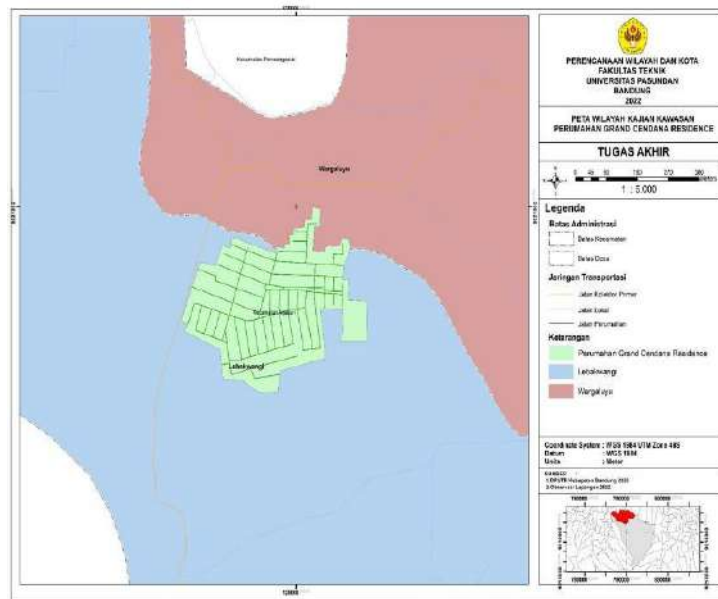
Pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada perubahan penggunaan lahan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya Peningkatan kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, serta intensitas lahan terbangun menjadi permasalahan yang umum terjadi (Zalsabilla, 2018), termasuk di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu seiring pengembangan Perumahan Grand Cendana Residence seluas ±13 Ha sejak tahun 2015 oleh PT Waguna Propertindo Lestari (Disperkimtan, 2018). Secara konseptual, tingginya kepadatan penduduk mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan tekanan dan dampak negatif terhadap lingkungan (Irmayani et al., 2018).

Keberadaan Perumahan Grand Cendana Residence secara tidak langsung mendorong penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa jumlah petani di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu menurun dari sekitar 3.038 orang pada tahun 2015 (Kecamatan Arjasari, 2015) menjadi 2.614 orang pada tahun 2019 (Profil Desa Lebakwangi dan Wargaluyu, 2019). Berkurangnya lahan pertanian sebagai sumber penghidupan utama mengharuskan petani beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, pembangunan perumahan turut memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat, baik sebelum maupun setelah proses pembangunan berlangsung (Pratama, 2020). Secara konseptual, ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji aktivitas manusia dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Yulinar, 2018).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara terpadu dampak pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence terhadap perubahan penggunaan lahan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kecamatan Arjasari, khususnya Desa Lebakwangi dan Wargaluyu, Kabupaten Bandung, mengingat masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan aspek spasial dan sosial-ekonomi dalam konteks pengembangan perumahan formal, padahal pemahaman ini penting untuk mendukung perencanaan wilayah yang berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 1.** Lokasi Perumahan Grand Cendana Residence

Sumber : Hasil analisis, 2022

**2. Data Dan Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data primer dengan kuisisioner adalah probability sampling dengan metode simple random sampling yang pengambilan anggota sampelnya dilakukan secara acak dari suatu populasi. Pada penelitian ini sudah ditentukan bahwa responden ialah sampel masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu dengan memiliki usia produktif minimal usia 17 tahun hingga batas maksimal 65 tahun.

Sampel diambil berdasarkan jumlah populasi yang berada di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu yaitu sebanyak 20.650 penduduk. Dengan menggunakan rumus berikut :

$$n = \frac{N}{N(d^2)+1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presisi yang ditetapkan

Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 20.650 penduduk dimasukan ke dalam rumus di atas dengan tingkat presisi yang ditetapkan yaitu 10%. Alasan peneliti menggunakan tingkat presisi 10% karena jumlah populasi kurang dari 1000. dijelaskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2)+1} = \frac{20.650}{20.650(0.1^2)+1} = \frac{20.650}{207.5} = 99.51$$

n = 99,51 dibulatkan menjadi 100 jiwa.

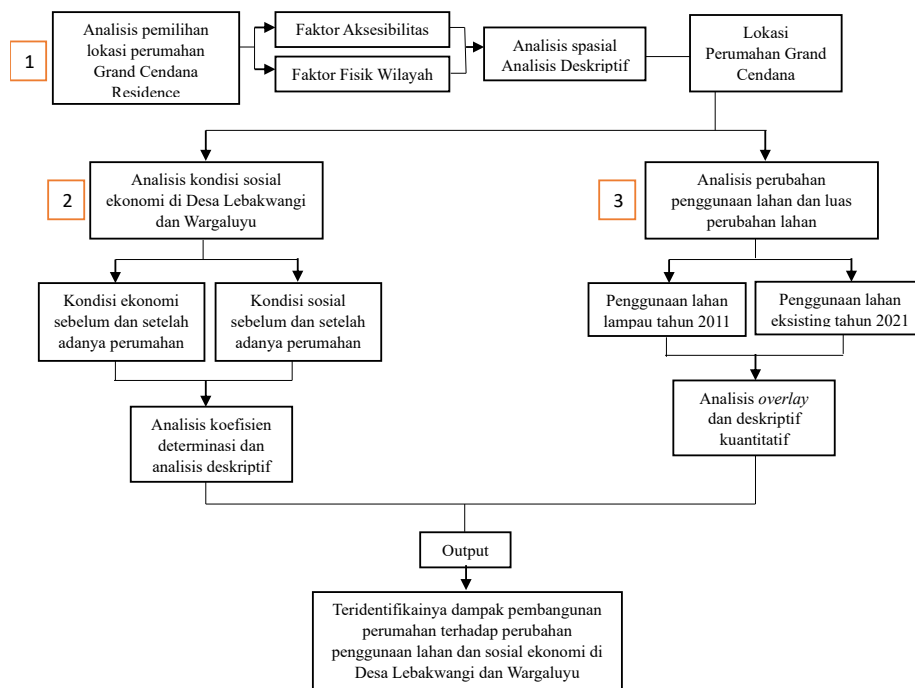
Berdasarkan perhitungan tersebut, dari 20.650 populasi masyarakat Desa Lebakwangi dan Wargaluyu diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang di sebarakan pada masyarakat terdampak area permukiman perumahan Grand Cendana Residence 50 responden dan masyarakat area luar perumahan Grand Cendana Residence 50 responden.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial, analisis overlay maps dan analisis koefisien determinasi yang dijelaskan dibawah ini :

1. Analisis spasial menggunakan peta digital (SHP) dan tematik dengan ArcGIS untuk menghasilkan peta jangkauan pelayanan serta mengkaji faktor fisik wilayah (topografi, tanah, batuan, kerawanan bencana) dan aksesibilitas, yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi dan pengembangan potensi wilayah (Koestoer, 2004 dalam Uun Wantri et al., 2016; A. Rezita & S. Rahayu, 2017; Saraswati et al., 2016).
2. Analisis overlay maps dilakukan dengan metode tumpang susun peta tematik untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan dan luas perubahannya sebelum dan sesudah pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence (Budiyanto, 2021).
3. Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana variabel X adalah kondisi sosial ekonomi setelah pembangunan dan variabel Y adalah kondisi sebelum pembangunan (Ghozali, 2016).

**Gambar 2.** Peta Kemiringan Lereng Perumahan Grand Cendana Residence

Sumber : Hasil analisis, 2022



### 3. Hasil dan Pembahasan

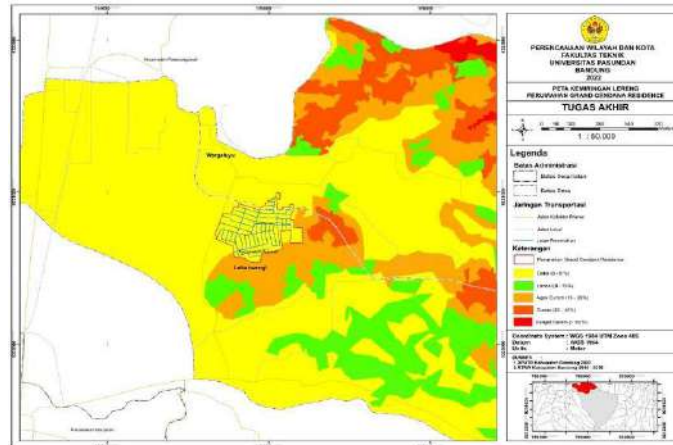
#### 3.1. Analisis Pemilihan Lokasi Perumahan Grand Cendana Residence di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu

##### 1. Analisis Fisik Perumahan Grand Cendana Residence

- Topografi

**Gambar 3.** Peta Kemiringan Lereng Perumahan Grand Cendana Residence

Sumber : Hasil analisis, 2022



**Tabel 1.** Kemiringan Lereng Perumahan Grand Cendana Residence

Sumber: Hasil analisis, 2022

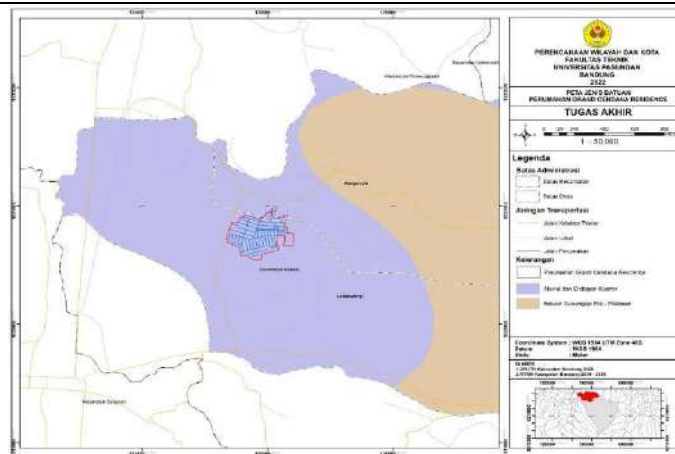
No	Keterangan	Standar	Analisis
1	Kemiringan lereng perumahan Grand Cendana Residence berada pada kelereng 0-8% dengan kategori datar.	Kemiringan lahan/kelereng untuk perumahan tidak melebihi 15% (SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan)	Berdasarkan standar perumahan Grand Cendana Residence memenuhi kriteria standar Kemiringan Lahan/Lereng Perumahan untuk kelayakan lokasi pembangunan perumahan.

Kemiringan lahan/lereng di Perumahan Grand Cendana Residence berada pada kelereng 0-8% dengan kategori datar. Berdasarkan standar kemiringan lereng perumahan Grand Cendana Residence memenuhi kriteria standar Kemiringan Lahan/Lereng Perumahan untuk kelayakan lokasi pembangunan perumahan. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan konsep kesesuaian lahan (land suitability) yang menyatakan bahwa pembangunan permukiman cenderung dilakukan pada lahan dengan risiko rendah dan kondisi fisik yang mendukung.

- Jenis Batuan

**Gambar 4.** Peta Jenis Batuan Perumahan Grand Cendana Residence

Sumber : Hasil analisis, 2022

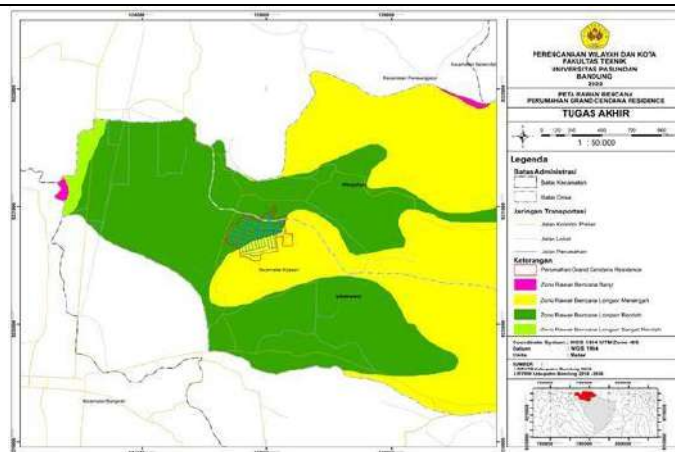


Perumahan Grand Cendana Residence dibangun di atas batuan aluvial dengan luas kawasan sekitar  $\pm 13$  Ha, yang secara karakteristik memiliki potensi tinggi untuk pengembangan permukiman. Oleh karena itu, pemilihan lokasi pembangunan di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu yang berada pada tanah aluvial dinilai telah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk peruntukan permukiman atau perumahan.

- Kebencanaan

**Gambar 5.** Peta Kebencanaan Perumahan Grand Cendana Residence

Sumber : Hasil analisis, 2022



Berdasarkan hasil analisis spasial, Perumahan Grand Cendana Residence tidak berada pada zona rawan longsor rendah maupun kawasan rawan banjir, sehingga dapat dinyatakan berada pada kondisi yang relatif aman dari potensi bencana.

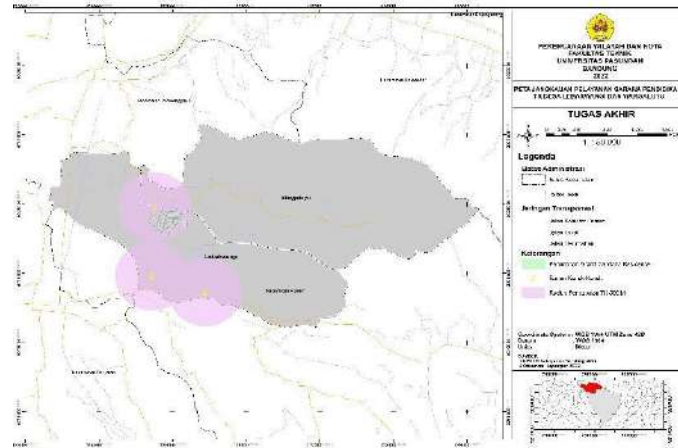
### 3.2. Analisis Pemilihan Lokasi Perumahan Grand Cendana Residence di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu

Tahapan analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi sebaran fasilitas publik di sekitar kawasan Perumahan Grand Cendana Residence yang disesuaikan dengan ketentuan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

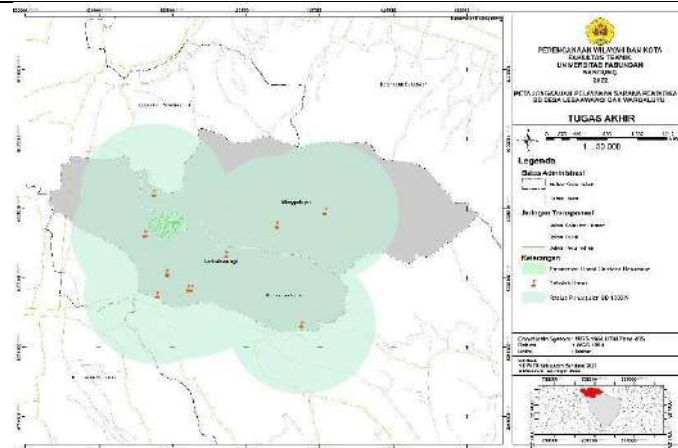
Dalam ketentuan tersebut, lokasi perumahan harus memenuhi kriteria keterjangkauan pelayanan fasilitas publik, sehingga dihasilkan peta jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perbelanjaan:

- Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan

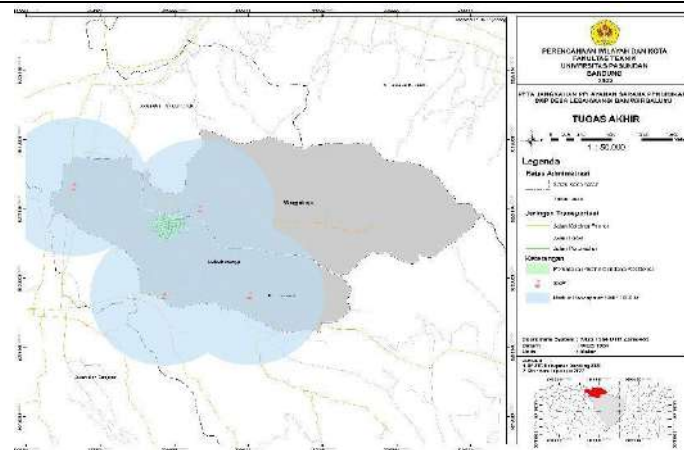
**Gambar 6.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan TK di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu  
Sumber : Hasil analisis, 2022



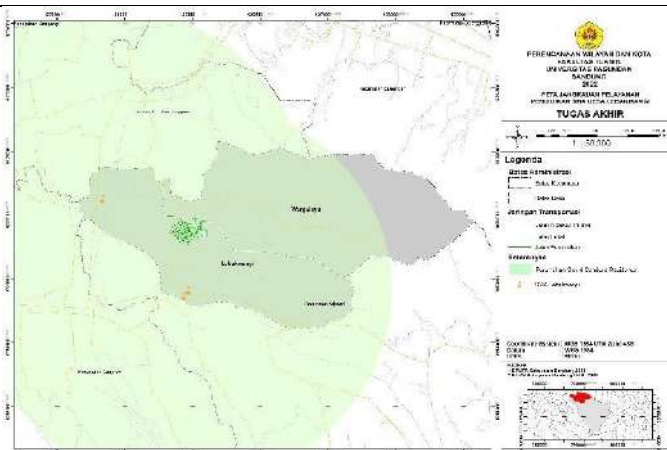
**Gambar 7.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan SD di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu  
Sumber : Hasil analisis, 2022



**Gambar 8.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan SMP di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu  
Sumber : Hasil analisis, 2022



**Gambar 9.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan SMA di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu  
Sumber : Hasil analisis, 2022

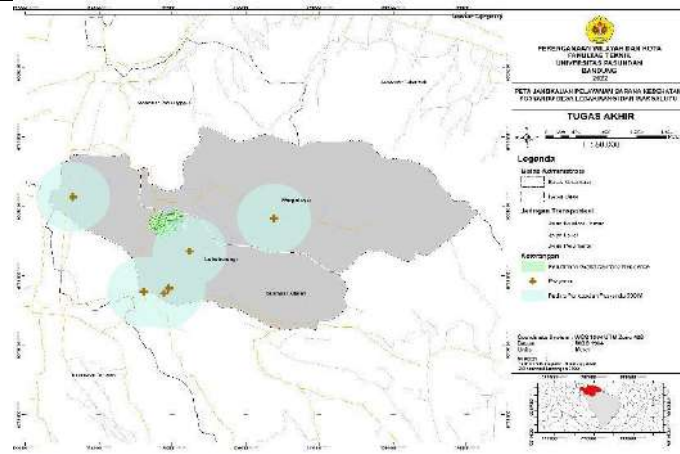


Sarana pendidikan di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu tergolong lengkap, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, jarak antara Perumahan Grand Cendana Residence dengan fasilitas pendidikan tersebut relatif dekat, sehingga seluruh sarana pendidikan yang ada mampu menjangkau kawasan perumahan Grand Cendana Residence.

- Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan

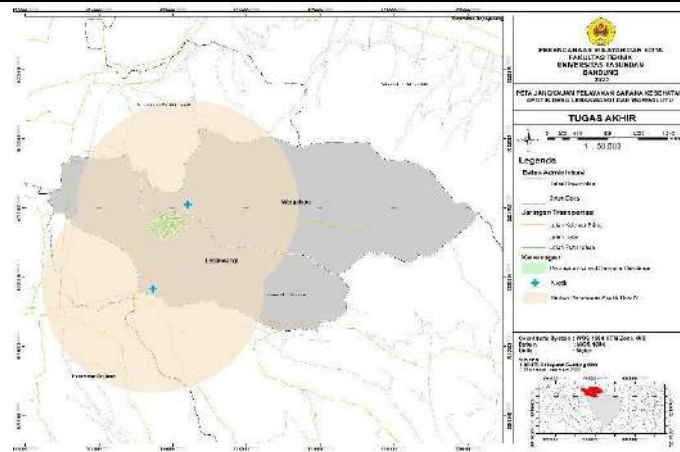
**Gambar 10.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan Posyandu di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu

Sumber : Hasil analisis, 2022



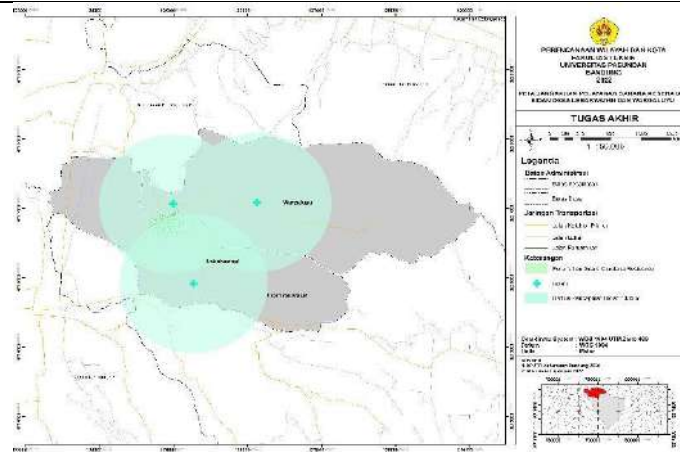
**Gambar 11.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan Apotik di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu

Sumber : Hasil analisis, 2022

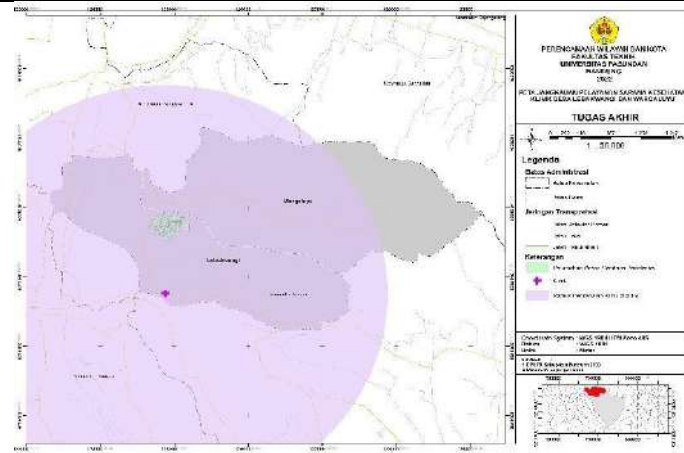


**Gambar 12.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan Bidan di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu

Sumber : Hasil analisis, 2022



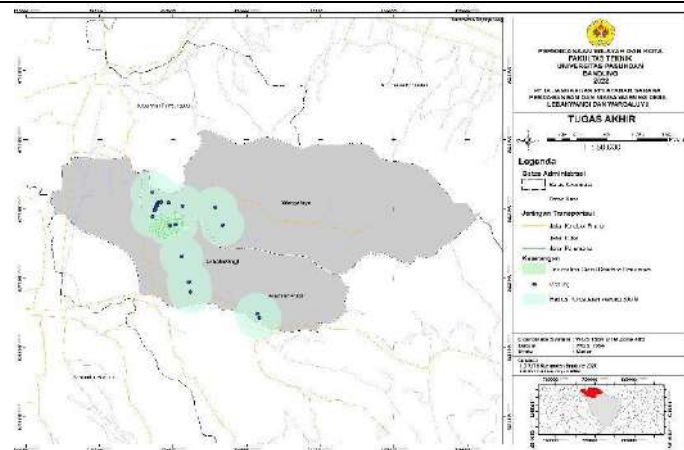
**Gambar 13.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan Klinik di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu  
Sumber : Hasil analisis, 2022



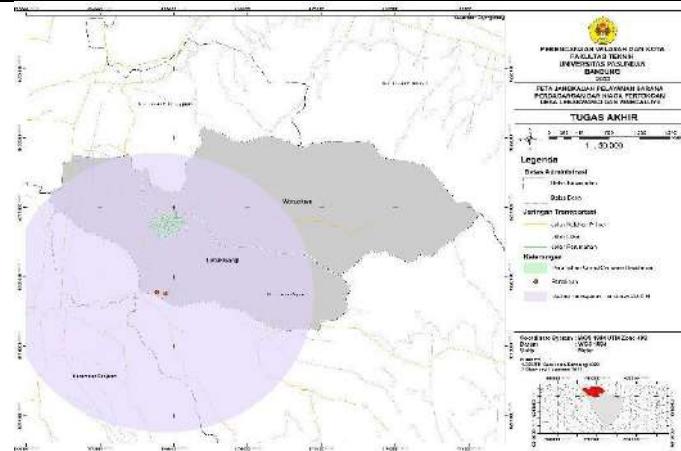
Sarana kesehatan di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu tergolong memadai, meliputi posyandu, apotek, bidan, dan klinik. Jarak fasilitas kesehatan tersebut dari Perumahan Grand Cendana Residence relatif dekat, sehingga seluruh sarana kesehatan yang ada mampu menjangkau dan melayani kawasan perumahan tersebut.

- Jangkauan Pelayanan Fasilitas Perdagangan dan Niaga

**Gambar 14.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Perdagangan dan Niaga Toko/Warung di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu  
Sumber : Hasil analisis, 2022



**Gambar 15.** Peta Jangkauan Pelayanan Sarana Perdagangan dan Niaga Pertokoan di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu  
Sumber : Hasil analisis, 2022



Sarana perdagangan dan niaga di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu tergolong cukup lengkap, berupa toko dan warung yang tersebar di sekitar Perumahan Grand Cendana Residence serta didukung oleh keberadaan minimarket. Jarak fasilitas perdagangan dan niaga tersebut relatif dekat dengan kawasan perumahan, sehingga seluruh sarana yang ada mampu menjangkau dan melayani Perumahan Grand Cendana Residence.

### 3.3. Analisis Dampak Pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence Terhadap Perubahan Lahan dan Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Analisis perubahan penggunaan lahan difokuskan untuk mengidentifikasi dampak langsung dari pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence. Perubahan lahan dianalisis menggunakan teknik overlapping maps antara peta penggunaan lahan tahun sebelumnya dan kondisi eksisting. Luas perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.** Luas Perubahan Penggunaan Lahan

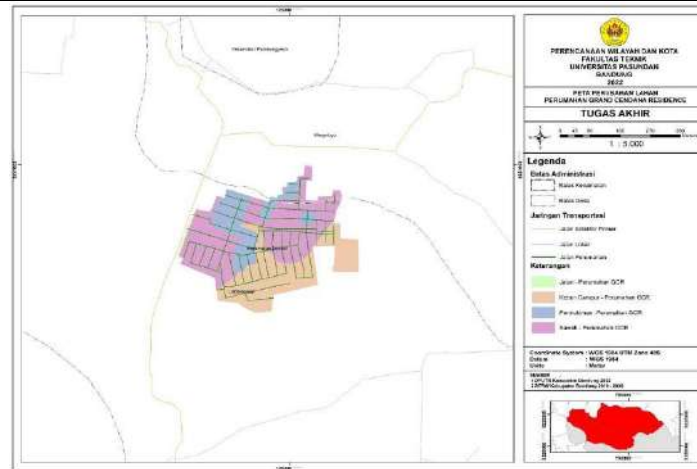
Sumber: Hasil analisis, 2022

Perubahan	Luas Perubahan Perdesa (Ha)		Total
	Lebakwangi	Wargaluyu	
Jalan > Perumahan Grand Cendana Residence	0,08	0,00	0,08
Kebun Campur > Perumahan Grand Cendana Residence	4,55	0,00	4,55
Permukiman > Perumahan Grand Cendana Residence	2,25	0,29	2,54
Sawah > Perumahan Grand Cendana Residence	5,96	0,51	6,47
Total	12,84	0,79	13,63

Pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu secara langsung menyebabkan perubahan penggunaan lahan seluas 13 Ha, dengan konversi terbesar berasal dari lahan sawah sebesar 6,47 Ha. Dampak pembangunan perumahan tersebut tidak hanya terbatas pada alih fungsi lahan, tetapi

juga mencakup perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu.

**Gambar 16.** Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Perumahan Grand Cendana Residence  
Sumber : Hasil analisis, 2022



Pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu secara tidak langsung turut memengaruhi perubahan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan perumahan. Dari sisi ekonomi, masyarakat Desa Lebakwangi dan Wargaluyu mengalami pergeseran dan diversifikasi mata pencaharian dengan menambah atau beralih ke sektor non-pertanian, seperti membuka usaha rumah makan, warung, toko bangunan, toko perlengkapan sekolah, grosir, SPBU, jasa laundry, toko sembako, kafe, usaha pencucian kendaraan, serta berbagai bentuk wirausaha lainnya.

### 3.4. Analisis Dampak Perumahan Grand Cendana Residence Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu

#### A. Dampak Perumahan Grand Cendana Residence Terhadap Kondisi Sosial

- Koefisien Determinasi Kondisi Sosial

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berpengaruh atau tidak terhadap tiap variabel X (kondisi sosial setelah adanya perumahan) dan  $Y_1$  (kondisi sosial sebelum adanya perumahan) dapat dilihat selengkapnya pada nilai koefisien determinasi dapat *model summary* sebagai berikut:

**Tabel 3.** Model Summary Kondisi Sosial

Sumber: Hasil analisis, 2022

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.341 <sup>a</sup>	.116	.107	1.879

a. Predictors: (Constant), Kondisi Sosial Setelah Adanya Perumahan

Dilihat dari hasil tabel diatas diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,116 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas X (kondisi sosial setelah adanya perumahan) terhadap variabel  $Y_1$  (kondisi sosial sebelum adanya perumahan) adalah sebesar 11,6 %. Secara teoritis, hal ini mendukung konsep bahwa pembangunan perumahan lebih cepat memengaruhi struktur ekonomi (mata pencaharian, usaha)

dibandingkan struktur sosial, karena perubahan sosial cenderung berlangsung lebih lambat dan membutuhkan waktu adaptasi.

#### B. Dampak Perumahan Grand Cendana Residence Terhadap Kondisi Ekonomi

- Koefisien Determinasi Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berpengaruh atau tidak terhadap tiap variabel X (kondisi ekonomi setelah adanya perumahan) dan Y<sub>2</sub> (kondisi ekonomi sebelum adanya perumahan) dapat dilihat selengkapnya pada nilai koefisien determinasi dapat *model summary* sebagai berikut:

**Tabel 4.** Model Summary Kondisi Ekonomi

Sumber: Hasil analisis, 2022

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 <sup>a</sup>	.561	.557	1.763

a. Predictors: (Constant), Kondisi Ekonomi Setelah Ada Perumahan

Dilihat dari hasil tabel diatas diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,561 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas X (kondisi ekonomi setelah adanya perumahan) terhadap variabel Y<sub>2</sub> (kondisi ekonomi sebelum adanya perumahan) adalah sebesar 56, 1%.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan Pemilihan lokasi perumahan Grand Cendana Residence di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu dilihat dari kondisi fisik dan aksesibilitas. Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 perumahan Grand Cendana Residence sudah memenuhi kriteria standar kemiringan lereng dan tidak termasuk pada rawan bencana alam. Lokasi pembangunan perumahan juga didukung dengan jenis batuan aluvial sebagaimana peruntukannya untuk permukiman. Selain kondisi fisik wilayah yang sudah memadai perumahan Grand Cendana Residence memiliki aksesibilitas yang ideal dimana jangkauan pada setiap fasilitas sarana yang ada dapat diakses dengan dekat dan mudah.

Pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu telah memicu perubahan penggunaan lahan seluas kurang lebih 13 Ha, dengan konversi terbesar terjadi pada lahan sawah yang mencapai 6,47 Ha. Alih fungsi lahan tersebut berimplikasi pada penurunan produksi padi yang berdampak pada berkurangnya pendapatan sektor pertanian, sehingga mendorong petani dan buruh tani untuk beralih atau mencari sumber mata pencaharian alternatif di luar sektor pertanian.

Berdasarkan perbandingan kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence, diperoleh hasil bahwa keberadaan perumahan tersebut memberikan pengaruh terhadap aspek sosial sebesar 11,6% yang tergolong sangat rendah, serta terhadap aspek ekonomi sebesar 56,1% yang termasuk dalam kategori sedang. Meskipun tingkat pengaruhnya berada pada kategori sangat rendah dan sedang, hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan Perumahan Grand Cendana

Residence tetap memberikan dampak positif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Lebakwangi dan Wargaluyu. Pada aspek sosial, terjadi penurunan intensitas kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti serta interaksi sosial berupa kebiasaan saling menyapa setelah adanya perumahan. Sementara itu, dari sisi ekonomi, dampak yang terlihat antara lain meningkatnya jumlah masyarakat yang berwirausaha, bertambahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, serta kenaikan nilai lahan dan sawah sejak pembangunan Perumahan Grand Cendana Residence.

## Referensi

### A. Buku Teks dan Jurnal

- A. Rezita dan S. Rahayu. (2017). Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Hunian Perumahan Di Kecamatan Ungaran Barat.
- Afrizal, M. (2017). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus di Kabupaten Bogor). *Jurnal Analisis Sosiologi*, 6(2), 78-89.
- Budiyanto, E. (2016). Sistem Informasi Geografis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Citra, E. A. (2014). ANALISIS KONDISI FISIK WILAYAH TERHADAP POLA KERUANGAN LOKASI PERUMAHAN KAWASAN AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN.
- Dewi, G. K., & Syamsiyah, N. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 843.
- Dewi, I. A. L., & Sarjana, I. M. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alih fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management)*.
- Erin, F. (2016). DAMPAK PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SETEMPAT.
- Fadilla, F., Yudhana, G., & Rini, E. F. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Bermukim Penghuni Perumahan Formal Kota Surakarta Studi Kasus Kelurahan Mojosongo.
- Fuadina, L. N., Rustiadi, E., & Pravitasari, A. E. (2020). The Dynamic of Land Use Changes and Regional Development in Bandung Metropolitan Area. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 556(1).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irmayani, S., Zul, A., & Melti Roza, A. (2018). Pengaruh Faktor Ekonomi, Sosial Ekonomi dan Iklim Terhadap Bencana Alam di Indonesia. *EcoGen*, 1(September), 539-548.
- Janah, U. A., Sunarto, & Pramono, I. B. (2017). Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(1), 33-38
- Jaya, R., Rijal, A. S., & Mohamad, I. R. (2020). Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Sub DAS Alo Terhadap Perilaku Pemanfaatan Fisik Lahan. *Journal of Humanity & Social Justice*, 2(1), 56.

- Munandar, A. (2019). Kajian Pengaruh Faktor–Faktor Perubahan Penggunaan Lahan Pada Pusat Kota Juang.
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210.
- Saraswati, Dian Ayu,dkk, 2016. Analisis Perubahan Luas dan Pola Persebaran Permukiman. *Jurnal Geodesi Undip*, Vol 5 (1): 155-163.
- Sudirman, S., Aminah, A., & Nasrullah, N. (2020). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Agrisistem*, 16(2), 167-176.
- Wantri Uun, Alviawati Eva, A. D. (2016). FAKTOR PENYEBAB PENGEMBANG MEMILIH LOKASI PERUMAHAN DI KECAMATAN MARTAPURA KOTA KABUPATEN BANJAR. *JPG(Jurnal Pendidikan Geografi)*.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Noven, S. A. (2020). Dinamika Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, August, 22.
- Yulinar. (2018). STUDI DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN PERUMAHAN CITRA GARDEN TERHADAP LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT TAMARUNANG KABUPATEN GOWA.
- Zhang, Z., Ghazali, S., Miceikienė, A., Zejak, D., Choobchian, S., Pietrzykowski, M., & Azadi, H. (2023). *Socio-economic impacts of agricultural land conversion: A meta-analysis*. *Land Use Policy*.

## **B. Dokumen dan Peraturan**

- Kecamatan Arjasari Dalam Angka, 2015.
- Kecamatan Arjasari Dalam Angka, 2020.
- Profil Desa Lebakwangi. (2019). Profil Desa Lebakwangi.
- Profil Desa Wargaluyu. (2019). Profil Desa Wargaluyu.
- SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

# Perencanaan Kolaboratif sebagai Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Studi di Kawasan Rawabogo

## Collaborative Planning as a Strategy for Sustainable Village Tourism Development: A Study of the Rawabogo Area

ST Zaini Anasya Hamidah<sup>1\*</sup>, Deden Syarifudin<sup>2</sup>, Meyliana Lisanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan

### Info Artikel

Artikel Masuk : 28/01/2026

Artikel Diterima : 06/05/2026

Tersedia Online : 13/05/2026

### Kata kunci :

*Desa Wisata,  
Potensi Pengembangan Desa  
Wisata, dan  
Perencanaan Kolaboratif*

### Keyword :

*Tourism Villages,  
Potential for Tourism Village  
Development, and  
Collaborative Planning*

### Abstrak

Desa wisata memiliki keunikan karakter dan daya tarik tersendiri yang pengembangannya menitikberatkan pada peran aktif masyarakat melalui partisipasi, kelembagaan pengelola, serta pemanfaatan potensi lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pengembangan desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo berbasis collaborative planning dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Daya tarik utama kawasan ini meliputi wisata alam seperti Sirah Cai Rawabogo, perkebunan kopi, teh, dan stroberi, serta Situs Gunung Padang; wisata budaya berupa hajat buruan, hajat lembur, ritual miasih kabumi Nagara Padang, dan padepokan kasepuhan Ajar Padang; serta daya tarik khusus seperti Kampung Kicimpring dan Kampung Warna-Warni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan kolaboratif belum berjalan secara optimal. Adapun potensi pengembangan desa wisata berbasis perencanaan kolaboratif di Rawabogo dan Desa Buninagara meliputi pelaksanaan FGD, penguatan komitmen para pemangku kepentingan, perancangan jalur wisata, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan retribusi daerah.

### Abstract

*Tourism villages possess distinctive characteristics and attractions, with development that emphasizes community involvement through participation, management organizations, and the utilization of local potential. This study examines the potential for developing tourism villages in the Rawabogo Tourism Area based on a collaborative planning approach using qualitative methods. The main attractions include natural tourism resources such as Sirah Cai Rawabogo, coffee, tea, and strawberry plantations, as well as the Gunung Padang Site; cultural tourism activities such as hajat buruan, hajat lembur, the miasih kabumi Nagara Padang ritual, and the Ajar Padang traditional hermitage; and special attractions including Kampung Kicimpring and Kampung Warna-Warni. The results indicate that the collaborative planning process has not yet been implemented optimally. The potential development of tourism villages based on collaborative planning in Rawabogo and Buninagara Village includes the implementation of focus group discussions (FGDs), strengthening stakeholder commitment, designing tourism routes, community capacity building, and regulating local tourism retribution.*

<sup>1</sup> zainiannasya95@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Sektor pariwisata berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maturbongs, 2020). Salah satu bentuknya adalah wisata perdesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri sebagai tujuan wisata (Ayuningsih et al., 2019), yang didefinisikan sebagai perjalanan sementara, terencana, baik individu maupun kelompok, untuk memperoleh kepuasan dan keseimbangan sosial, budaya, serta lingkungan (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020). Seiring perkembangannya, pariwisata mengalami diversifikasi dan tumbuh pesat sebagai sektor industri jasa kreatif dan ekonomi global (Sukirman, 2017), serta berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah perdesaan (Astawa et al., 2018).

Masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam terhadap potensi dan kelemahan desa sehingga perannya sangat penting dalam pengembangan desa wisata (Herdiana, 2019). Namun, sektor pariwisata juga menghadapi tantangan, seperti dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas wisata akibat pembatasan sosial (Noviarita et al., 2021). Desa wisata merupakan kawasan perdesaan dengan daya tarik alam dan budaya yang didukung fasilitas pariwisata serta dikelola secara partisipatif (Handayani et al., 2018), berlandaskan prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sesotyaningtyas & Manaf, 2015). Desa wisata juga memanfaatkan potensi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan distribusi manfaat (Utami et al., 2019), serta menjadi strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan di era globalisasi (Zolfani et al., 2015). Keunikan desa wisata dikemas secara alami dengan dukungan fasilitas penunjang pariwisata (Atmoko, 2014).

Pengembangan destinasi wisata harus tetap menjaga keaslian daya tarik wisata serta keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal (Komariah et al., 2018), yang diperkuat melalui strategi promosi dan pengembangan produk wisata berbasis tema (Prasetya et al., 2017). Selain itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan media menjadi kunci agar pengembangan desa wisata dapat berlangsung secara terpadu, sekaligus menjaga nilai budaya dan kearifan lokal melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (Kirana & Artisa, 2020; Maturbongs et al., 2019).

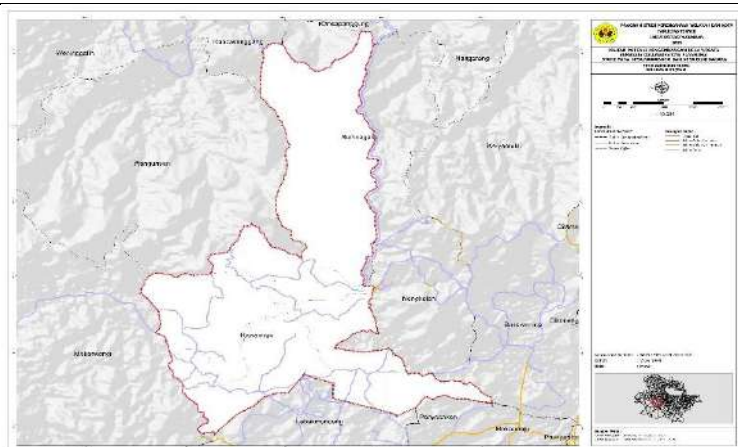
Berdasarkan regulasi daerah, Gunung Padang di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya melalui Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016, sedangkan Gunung Padang di Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, masuk dalam kawasan wisata Jalur Selatan berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012. Masyarakat Rawabogo masih didominasi oleh aktivitas pertanian dan pelestarian tradisi budaya yang kuat, sementara sebagian besar penduduk Desa Buninagara juga menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Secara administratif, Rawabogo telah ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2011, sedangkan Buninagara belum berstatus sebagai desa wisata di Kabupaten Bandung Barat.

Kawasan Pariwisata Rawabogo dipilih sebagai lokasi kajian karena pengembangannya melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, dan komunitas, namun masih memerlukan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan

(Purawinata & Indratno, 2021). Pengembangan desa wisata perlu dibenahi terutama pada aspek manajemen dan promosi pariwisata (Sugiarto & Siswantara, 2012). Penelitian ini berfokus pada Kawasan Pariwisata Rawabogo di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, serta Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dengan pendekatan collaborative planning yang menekankan pembagian peran dan tanggung jawab lintas aktor dalam pembangunan (Permana & Agustine, 2022; Setiadi, 2014).

**Gambar 1.** Peta Administrasi Wilayah Kajian

Sumber : Hasil analisis, 2022



## 2. Data Dan Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di wilayah studi, kemudian meng gambarkannya secara sistematis dan komprehensif agar dapat menjawab fokus penelitian, yaitu potensi pengembangan desa wisata berbasis collaborative planning. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi tersebut di Kawasan Pariwisata Rawabogo melalui pemaparan rinci berdasarkan informasi langsung yang diperoleh dari narasumber dan pemangku kepentingan terkait.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan kunci, meliputi Kepala Desa Rawabogo dan Kepala Desa Buninagara, akademisi yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Rawabogo, ketua Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Desa Wisata Rawabogo dan Buninagara, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan pariwisata di kawasan tersebut. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui kegiatan observasi langsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder dimanfaatkan untuk melengkapi informasi terkait komponen pariwisata yang bersumber dari berbagai dokumen, seperti masterplan desa wisata, profil desa, RPJMDes Kawasan Pariwisata Rawabogo, peta administrasi dalam format SHP, album peta, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pengembangan desa wisata. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis spasial, analisis deskriptif, analisis interaktif, dan analisis isi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Komponen Pariwisata yang akan berpotensi dikembangkan menjadi Desa Wisata berbasis Collaborative Planning di Kawasan Pariwisata Rawabogo

##### 1. Atraksi

Atraksi yang ditawarkan di Kawasan Pariwisata Rawabogo adalah atraksi wisata perdesaan yang dimana terbagi menjadi tiga yaitu atraksi daya tarik alami, atraksi daya tarik khusus dan atraksi daya tarik wisata budaya, berikut akan dijelaskan:

a. Daya tarik wisata alami yang terdapat di Kawasan Pariwisata Rawabogo terdapat banyak daya tarik diantaranya yaitu terdapat sirah cai rawabogo, atraksi daya tarik alami kebun kopi, atraksi daya tarik alami kebun teh, atraksi daya tarik alami kebun strawberry, kemudian yang terakhir atraksi daya tarik alami yang ada di Situs Gunung Padang terdapat beberapa batuan diantaranya atraksi daya tarik alami batu lawang, atraksi daya tarik alami batu kaca – kaca, atraksi daya tarik alami batu palawangan ibu, atraksi daya tarik alami batu pupuk ibu, atraksi daya tarik alami batu panyipuan, atraksi daya tarik alami batu kaca saadeg, atraksi daya tarik alami batu gedung peteng, atraksi daya tarik alami batu keraton, atraksi daya tarik alami batu kutarungu, atraksi daya tarik alami batu masigit agung, atraksi daya tarik alami batu bumi agung, atraksi daya tarik alami batu kursi agung, atraksi daya tarik alami batu padaringan, atraksi daya tarik alami batu puncak manik.

- Sirah Cai Rawabogo

Sirah cai rawabogo ini berada di Kampung Rawabogo, Desa Rawabogo, Kabupaten Bandung. Sirah cai dikenal sebagai hulu dari mata air, yang dimana sirah cai ini dapat dikatakan sebagai sebuah daya tarik dikarenakan mempunyai keunikan yaitu airnya yang tidak berhenti mengalir serta keasliannya dengan airnya yang jernih.

- Atraksi Daya Tarik Alami Kebun Kopi

Kopi menjadi salah satu bidang yang sedang digemari masyarakat pada era ini. Terdapat atraksi daya tarik alami kebun kopi yang berada di Kampung Coblongan, Desa Rawabogo, Kabupaten Bandung yang dimana merupakan salah satu penyumbang kopi ekspor dari Indonesia dengan salah satu produknya adalah “Sunda Hejo” yang berada di Desa Rawabogo. Wisata kebun kopi ditengah perkebunan kopi menjadi salah satu opsi menjadi desain dalam pengembangan desa wisata yang menjaga kelestarian lingkungannya beserta keasliannya.

- Atraksi Daya Tarik Alami Kebun Teh

Atraksi daya tarik alami Kebun Teh terletak di Desa Rawabogo memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan hijau yang luas dan memiliki udara yang sejuk yang dimana membuat perkebunan teh yang berada di Desa Rawabogo cocok untuk menjadi tujuan wisata.

- Atraksi Daya Tarik Alami Kebun Strawberry

Terletak di Desa Rawabogo memiliki kondisi alam yang potensial untuk pengembangan agroekowisata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bandung Tahun 2011 tentang Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung bahwa jenis wisata di Desa Rawabogo Kabupaten Bandung adalah

agroekowisata yang dimana seharusnya kebun strawberry termasuk ke dalam agroekowisata tetapi temuan peneliti di lapangan pada kondisi saat ini bahwa di Desa Rawabogo perkebunan strawberry tidak dibuka untuk berwisata dan hanya dikelola oleh warga masyarakat Desa Rawabogo.

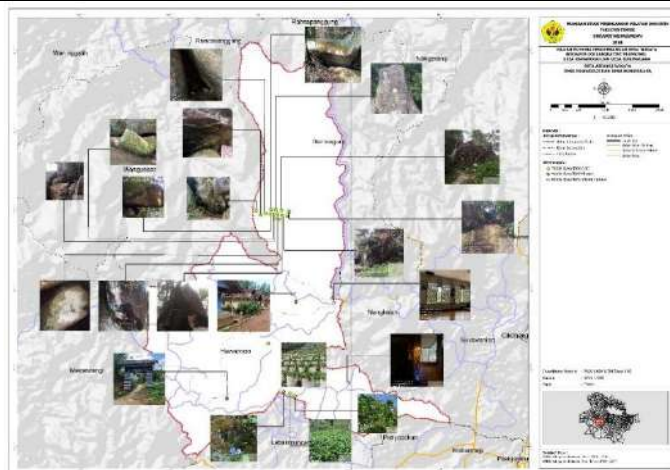
b. Atraksi Daya tarik budaya

Daya tarik budaya yang terdapat di Desa Rawabogo terdapat upacara/ritual Miasih Bumi Gunung Nagara Padang yang dilakukan satu tahun sekali di Situs Gunung Padang yang dilaksanakan pada tanggal 9 september melibatkan RT/RW/Desa/Kecamatan/ pemerintah Desa maupun lintas agama seperti Buddha, Hindu yang berdatangan. Ritual ini biasanya dipimpin oleh sesepuh adat yang dimana upacara/ritual ini sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rawabogo yang mengundang berbagai kalangan dalam pelaksanaannya. Upacara/ritual ini dilaksanakan untuk memperingati syukuran ke bumi dari hasil panen yang didapatkan dan untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu bersyukur serta merawat kesuburan mata air yang menjadi sumber daya utama untuk masyarakat rawabogo sendiri. Kemudian ada hajat buruan, dimana dilaksanakan setiap ada wabah penyakit (tolak bala) yang dimana dilaksanakan shalawat di halaman rumah bersama ustadz, membaca do'a dalam kaidah islam, puji syukur. Untuk kesenian yang ada di Desa Rawabogo sendiri yaitu terdapat seni jaipong, singa depok, debus, pencak silat, seni ketangkasan domba, karinding, tarawangsa, bangkong reang dan terdapat situs yang dimana situs tersebut dinamakan Situs Nagara Padang.

c. Daya tarik khusus berdasarkan temuan peneliti yaitu adanya kampung kicimpring yang berlokasi di Desa Rawabogo. Kampung kicimpring ini merupakan olahan makanan yang terbuat dari olahan singkong, yang mana memiliki variasi rasa yang beragam, dari mulai rasa gurih, asin, manis, pedas, dan merambah ke rasa rasa yang lainnya. Makanan ini dikatakan sebagai salah satu produk dari tanah sunda. Temuan daya tarik khusus selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti adalah kampung warna-warni yang terletak di Desa Rawabogo. Kampung ini adalah sebuah kampung yang sengaja dibuat dengan cat rumah warna - warni serta memiliki peran berdasarkan pemerintah desa bahwa termasuk dalam salah satu homestay yang dipakai oleh wisatawan yang berdatangan ke Desa Wisata Rawabogo.

**Gambar 2.** Peta Sebaran Atraksi Wista di Desa Rawabogo

Sumber : Hasil analisis, 2022



## 2. Amenitas

Amenitas merupakan seluruh bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Pariwisata Rawabogo sebagai segala kebutuhan selama berkunjung.

### a. Prasarana Kebutuhan Masyarakat

Prasarana kebutuhan masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo yaitu adanya puskesmas, pondok, masjid, yang berada di Desa Rawabogo yang dimana hal tersebut sangat diperlukan dalam mendukung pengembangan pariwisata di Desa Rawabogo. Untuk prasarana kebutuhan masyarakat memerlukan pembenahan kembali dikarenakan kondisi mushola yang kurang terawat sehingga kondisi mushola tersebut kotor yang dimana wisatawan beragama muslim perlu mengingat tuntutan shalat wajib dilaksanakan lima waktu dalam satu hari yang membuat kebutuhan akan masjid/mushola sebagai sebuah amenities/fasilitas umum yang mutlak diperlukan di dalam Kawasan Pariwisata yang seharusnya amenities sendiri memiliki kenyamanan untuk wisatawan yang berkunjung.

### b. Prasarana Umum

Prasarana Umum yang tersedia di Kawasan Pariwisata Rawabogo merupakan jaringan jalan desa yang dimana merupakan bagian dari sistem transportasi yang memiliki peran penting dalam kepariwisataan dengan sebagian jalan kondisinya sudah di beton dan sebagian jalan belum. Untuk jaringan jalan yang ada di Desa Rawabogo memiliki kondisi yang relatif bagus dan di Desa Buninagara memiliki jalan yang sebagian sudah dibeton dan sebagian jalan memiliki kerusakan, jalan desa ini juga sebetulnya hanya memuat satu mobil dan satu motor artinya tidak terjangkau oleh Bus Pariwisata.

### c. Sarana Pokok Kepariwisata

Sarana pokok kepariwisataan sendiri merupakan salah satu komponen amenities yang memiliki peran cukup penting untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Di Kawasan Pariwisata terdapat sarana pokok kepariwisataan berupa toilet dan pos tiket menuju Situs Nagara Padang, yang dimana kondisi yang berada di Situs Nagara Padang ini perlu dibenahi karena dengan kondisi toilet yang kurang cukup layak dan terbelengkalai kemudian untuk pos tiket pun

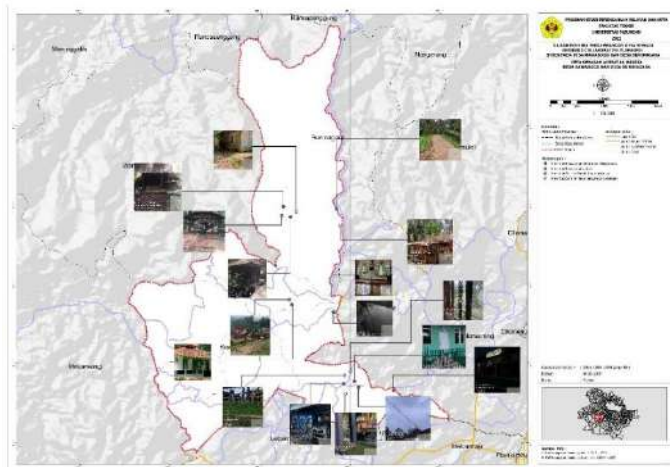
memerlukan pembenahan yang dimana perlunya petunjuk arah masuk dan peta lokasi wisata Situs Gunung Nagara Padang.

d. Sarana Penunjang Kepariwisataaan

Sarana penunjang kepariwisataan yang tersedia di Kawasan Pariwisata Rawabogo yaitu terdapat galeri cinderamata, warung pasar dan padepokan. Galeri cinderamata ini terdapat beberapa seni kriya hasil Bapak Ir. Setiabudi yang merupakan pemilik galeri ini, terdapat ragam seni kriya dengan menggunakan teknik pahat yang ada salah satunya adalah berupa kap lampu yang terbuat dari bahan dasar bambu kemudian diukir dan dipahat dengan berbagai macam bentuk serta memiliki arti tersendiri di setiap ukirannya, lokasi galeri ini terdapat di Desa Rawabogo.

Padepokan Kasepuhan Ajar Padang berada di Kawasan Pariwisata Rawabogo tepatnya di Desa Rawabogo, di padepokan ini terdapat beberapa budaya (kasenian) yang ada seperti karinding, tarawangsa, calung yang memiliki jadwal untuk berlatih karena kasenian ini biasa ditampilkan pada acara-acara tertentu yang ada di Desa Rawabogo seperti "Ritual Miasih Kabumi" kemudian padepokan ini menjadi persinggahan sementara karena biasanya wisatawan yang hendak naik ke Situs Nagara Padang akan mendatangi terlebih dahulu padepokan ini untuk sekedar beristirahat dan berbincang dengan juru kunci Situs Nagara Padang yaitu Bapak Undang.

**Gambar 3.** Peta Sebaran Amenitas Wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo  
Sumber : Hasil analisis, 2022



3. Aksesibilitas

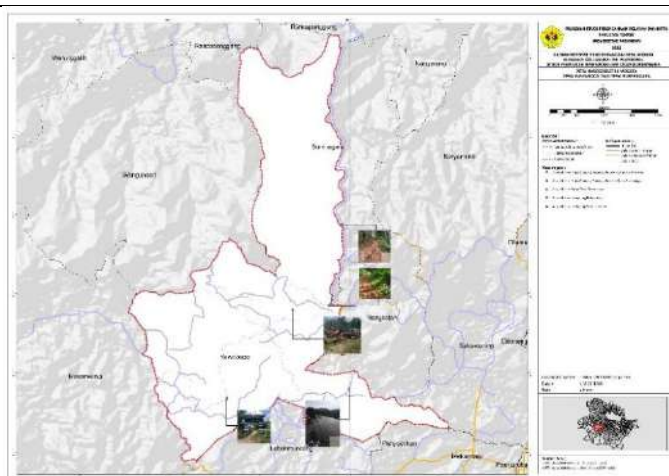
Kondisi Jalan menuju Kawasan Pariwisata Rawabogo via Jalan Desa Rawabogo dapat dikatakan memiliki kondisi jalan yang relatif cukup bagus dikarenakan mayoritas jalan adalah beton dan aspal nemun via Jalan Desa Buninagara beberapa titik kondisi jalan bagus dan sisanya kondisi jalan yang rusak. Namun yang menjadi kendala adalah tidak adanya kendaraan umum yang bisa digunakan dikarenakan Kawasan Pariwisata Rawabogo sendiri tidak dilalui oleh kendaraan umum seperti angkutan umum, mikro bis dan lainnya. Untuk menuju Desa Rawabogo yaitu melalui Kecamatan Pasir Jambu (Kampung Batu Reok), jarak dari Desa Rawabogo ke Jalan raya adalah 7,8 Km, sedangkan untuk jarak dari Desa Rawabogo ke Terminal

Cibeureum yang berada di Kecamatan Ciwidey adalah 7,7 Km. Untuk menuju Ke Desa Buninagara yaitu melewati akses jalan Desa di Kabupaten Bandung Barat melalui Kecamatan Sindangkerta, jarak dari Desa Buninagara ke Terminal Kecamatan Sindangkerta sendiri yaitu sejauh 10 Km.

Aksesibilitas menuju Situs Gunung Padang via Desa Rawabogo maupun Desa Buninagara memiliki kondisi jalan berupa tanah merah bebatuan dan menanjak, yang dimana aksesibilitas ini belum optimal masih ada yang perlu di benahi seperti akses jalan yang sempit dan kondisi jalan yang masih berupa tanah merah bisa membahayakan para wisatawan.

**Gambar 4.** Peta Sebaran Aksesibilitas di Kawasan Pariwisata Rawabogo

Sumber : Hasil analisis, 2022



- Kelembagaan  
Kelembagaan di Desa Rawabogo sebelumnya sudah memiliki kelompok penggerak pariwisata yang didirikan pada tahun 2011 setelah Desa Rawabogo ditetapkan termasuk kedalam Desa Wisata menurut SK Bupati Tahun 2011 dengan jenis wisata agroekowisata dan memiliki produk unggulan senibudaya, handycraft, kuliner tradisional, peternakan, pertanian dan perkebunan. Berdasarkan temuan peneliti adalah kelembagaan di Desa Rawabogo tidak berjalan secara maksimal dikarenakan terkendala oleh pendanaan dan kurang didukungnya oleh pihak Pemerintah. Pada kelembagaan di Desa Rawabogo adalah kurangnya proses komunikasi diantara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Kelompok Penggerak Pariwisata maupun Tokoh Adat Budaya serta Masyarakat yang ada sehingga mengakibatkan objek wisata yang ada di Desa Rawabogo sempat terbengkalai beberapa waktu pada saat Pandemi Covid-19. Sebelumnya peneliti menyinggung terkait pendanaan, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketua desa wisata (Bapak Ir. Setiabudi) pernah menganggarkan 100 juta untuk pembiayaan dan pengembangan Desa Wisata Rawabogo namun sampai saat ini memang pendanaan tersebut tidak turun. Desa Rawabogo sudah memiliki masterplan yang dibuat dengan melibatkan berbagai aktor seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Karang Taruna, Kelompok Penggerak Pariwisata Desa Rawabogo (KOMPEPAR), Ketua Desa Wisata, Pemerintah Desa dll. Untuk Desa Wisata Rawabogo sendiri

hanya memiliki website dan akun Instagram yang bernama rawabogovillage.blogspot.com yang mana informasi terkait wisata yang ada cukup terbatas serta belum adanya pemasaran/paket wisata yang tersedia. Sedangkan di Desa Buninagara sendiri tidak memiliki Kelompok Penggerak Pariwisata sampai saat ini mengakibatkan kurangnya koordinasi untuk mengelola wisata yang berada di Kawasan Pariwisata Rawabogo yang diakibatkan oleh koordinasi yang sulit karena pengelolaannya tidak satu pintu. Kemudian berkaitan dengan salah satu atraksi wisata Situs Gunung Padang yang terdapat di dua lokasi yaitu Kawasan Pariwisata Rawabogo yang dimana seharusnya pengelolaan dilakukan oleh kedua desa tersebut namun pada kondisi di lapangan bahwa pengelolaan atraksi wisata Situs Gunung Padang itu sendiri hanya dikelola oleh masyarakat Desa Rawabogo tanpa ada campur tangan dari pihak Desa Buninagara sampai dengan detik ini dan selain itu untuk Situs Gunung Padang itu sendiri berada pada lahan perhutani yang dimana, sempat saat ini lahan perhutani juga tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Rawabogo.

### 3.2. Proses Collaborative Planning dalam Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo

Perencanaan kolaboratif merupakan pendekatan alternatif dalam penataan ruang yang menekankan keterlibatan berbagai pihak, tidak terbatas pada pemangku kepentingan pemerintah, tetapi juga mencakup aktor nonpemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini memberikan dampak positif, antara lain menghasilkan perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah dalam pengelolaan ruang. Dalam pelaksanaannya, kerja sama dengan para pemangku kepentingan mengacu pada lima indikator proses collaborative planning menurut Ansell dan Gash (2008), yaitu dialog langsung antaraktor, pembentukan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, terciptanya pemahaman bersama, serta pencapaian hasil antara, yang melibatkan Pemerintah Kawasan Pariwisata Rawabogo.

#### 1) Dialog Tatap Muka/Face to Face Dialog

Dalam melakukan pertemuan antar *stakeholders* di Kawasan Pariwisata Rawabogo hanya dilaksanakan pada saat acara yang biasa dilaksanakan yaitu "Miasih Ka Bumi" yang dilaksanakan di Gunung Padang setahun sekali yang dimana *stakeholders* yang hadir pada saat acara ini antara lain Pemerintah Desa Rawabogo, Pemerintah Desa Buninagara (apabila tidak berhalangan hadir), kelompok penggerak pariwisata, masyarakat Desa Rawabogo dan beberapa akademisi ketika diundang oleh Pemerintah Desa Rawabogo. Pada pertemuan tersebut *stakeholders* tidak membicarakan dan duduk bersama untuk membicarakan terkait pengelolaan/pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo yang menimbulkan belum secara sinergi dalam satu pintu mengelola potensi wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo terutama adalah Situs Gunung Padang yang terletak di Desa Buninagara dan Desa Rawabogo. Untuk pengelolaan dan pengembangan atraksi wisata Situs Gunung Padang sendiri hanya dikelola oleh masyarakat di Desa Rawabogo dan pendapatannya hanya masuk ke masyarakat Desa Rawabogo.

## 2) Membangun Kepercayaan/*Trust Building*

Dalam kolaborasi antar *stakeholders* untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo melihat dalam membangun kepercayaan masih kurang/enggan dalam membangun kepercayaan. Hal ini terlihat bahwa hasil dari wawancara kepada Pemerintah Desa Rawabogo dan Pemerintah Desa Buninagara bahwa untuk melakukan pertemuan saja tidak dilaksanakan secara optimal dan seharusnya dilakukan, dan dari hasil observasi lapangan bahwa untuk pengembangan desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo khususnya Situs Gunung Padang pihak masyarakat Desa Rawabogo enggan untuk diajak kerja sama dan punya pemikiran sendiri yang bermaksud ingin tetap mempertahankan kultur budayanya dikarenakan pihak tokoh budaya sendiri (Bapak Undang) sudah melakukan membangun kepercayaan dalam pengembangan potensi wisata Situs Gunung Padang yang tidak disadari oleh *stakeholders* lain yaitu lebih ke bentuk aksi seperti mengadakan acara adat budaya.

## 3) Komitmen Terhadap Proses/*Comitment To Process*

Komitmen yang terlihat dalam kolaborasi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo masih terlihat kurang kuat dimana tidak adanya komitmen diantara *stakeholders* dikarenakan memiliki tujuan yang berbeda yang tentunya tidak akan mencapai komitmen terhadap proses dikarenakan tidak memiliki tujuan yang sama.

## 4) Pemahaman Bersama/*Share Understanding* dalam tahapan ini memerlukan pemahaman yang sama antar *stakeholders* mengenai visi, misi dan tujuan yang jelas termasuk pemahaman dalam mengidentifikasi masalah bersama untuk menemukan solusi, pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo ini yaitu pemahaman bersama tidak terlaksana dikarenakan proses kolaborasi hanya tercapai pada tahap membangun kepercayaan.

Hasil Sementara/*Intermediate Outcome* diharapkan dapat mewakili keluaran nyata sebagai hasil proses penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses. Hasil sementara dari kolaborasi antar *stakeholders* sesuai tidak terlaksana.

### 3.3. Potensi Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Planning* di Kawasan Pariwisata Rawabogo

Untuk semua *stakeholders* yang terlibat langkah yang pertama adalah membuat agenda *Focus Group Discussion* yang dimana diawali dari membangun sebuah kolaborasi dengan menanamkan sikap saling membutuhkan diantara *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo, yang dimana ketika sudah ditanamkan sikap saling membutuhkan akan terwujudnya berkembangnya wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo. Harapannya semua *stakeholders* dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan potensi yang ada. Yang merujuk pada (Amilia et al., 2020) menjelaskan bahwa dalam penelitiannya *Focus Group Discussion* bermanfaat untuk membangun partisipasi *stakeholders* dalam mengenali potensi wilayahnya serta melakukan penyusunan skala prioritas pengembangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh masing – masing *stakeholders* diantaranya:

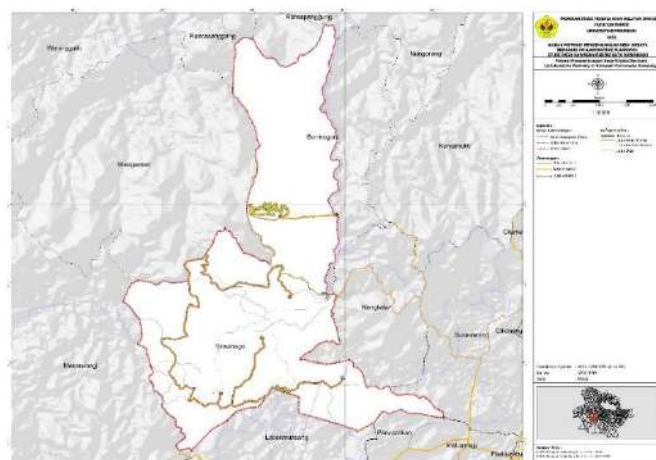
- Pemerintah Desa Rawabogo dan Pemerintah Desa Buninagara:
  1. Pemerintah berperan dalam penyedia akses dan infrastruktur berkaitan dengan kepariwisataan; memfasilitasi bidang industri dan perdagangan memfasilitasi bidang pertanian; serta memberikan pembinaan kepada masyarakat di Kawasan

- Pariwisata Rawabogo.
2. Mengadakan koordinasi diantara kedua desa dan juga adanya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo.
  3. Memberikan pembekalan serta kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga berperan aktif dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo.
  4. Memperkuat komitmen dengan menciptakan desain program secara bersama (pembentukan kelompok kerja berdasarkan adanya program bersama yang terbentuk) dalam upaya mobilisasi kepentingan setiap *stakeholders*) setelah terbentuk kelompok kerja sebaiknya dilakukan perencanaan untuk menetapkan standar atau indikator keberhasilan program yang akan dicapai untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo.
  5. Melakukan retribusi pariwisata atau pungutan yang harus dibayarkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Pariwisata Rawabogo atau kata lain yaitu ditegakan kembali terkait *ticketing* yang nantinya akan masuk untuk pemeliharaan semua atraksi wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
  6. Pemerintah mendorong pengembangan desa wisata untuk melestarikan keanekaragaman budaya masyarakat di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
- Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR):
    1. Membangun koordinasi antara pemerintah, kelompok penggerak pariwisata, masyarakat dan akademisi dengan peningkatan kapasitas lembaga desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
    2. Menganalisis beberapa rencana untuk bekerja sama dengan atraksi daya tarik wisata yang berada di sekitar Kawasan Pariwisata Rawabogo.
    3. Mengembangkan, memperkenalkan, mendayagunakan promosi yang efektif, efisien melalui media sosial untuk menarik wisatawan dan sering meng-*explore* terkait potensi wisata berupa keindahan alam maupun budaya yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
    4. Memberi penyuluhan kepada masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo untuk menarik wisatawan dan sering meng-*explore* terkait potensi wisata berupa keindahan alam maupun budaya yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
    5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
    6. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan mengadakan simulasi dan pemahaman kepada masyarakat ketika menerima tamu di Kawasan Pariwisata Rawabogo, kemudian pelatihan dan peningkatan budaya yang ada, program pelatihan pengelolaan desa wisata.
    7. Membuat jadwal rencana, progress, dan apa saja yang sudah pernah dilakukan sesuai dengan tugas dari masing - masing pengurus Kawasan Pariwisata Rawabogo.
    8. Selalu meng-*upgrade* diri sebagai pengurus misalnya adalah rutin melakukan study banding ke desa wisata lain agar mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru terkait menerima wisatawan dan memperlakukan wisatawan yang berdatangan ke Kawasan Pariwisata Rawabogo.
    9. Membuat paket wisata dan kalender wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo.

- Masyarakat:
  1. Masyarakat yang berada di Kawasan Pariwisata Rawabogo menyediakan rumahnya sebagai tempat persinggahan sementara atau penginapan untuk para wisatawan yang ingin bermalam di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
  2. Masyarakat menjajakan produk unggulan yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo seperti kicimpring, handycraft dll sebagai cinderamata agar setelah pulang dari Kawasan Pariwisata Rawabogo memiliki pengalaman tertentu.
  3. Menyediakan lahan parkir kendaraan roda dua/roda empat bagi wisatawan sekaligus sebagai petugas dan penjaga parkir di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
- Akademisi:
  1. Memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya penduduk yang bermukim di sekitar objek dan daya tarik wisata, mengenai urgensi sektor pariwisata serta manfaat pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kawasan Pariwisata Rawabogo.
  2. Membuat rute agar mendorong pengembangan wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo untuk meningkatkan perekonomian ke dua desa dengan cara membagi kunjungan wisata di Desa Buninagara dan Desa Rawabogo yaitu Wisata Spiritual di Desa Buninagara dan Wisata Alami dan Wisata Khusus di Desa Rawaogo kaitanya dengan pembagian keuntungan dari ke dua desa. Untuk rute nya sendiri yaitu dibagi menjadi 3 diantaranya:
    - Rute 1: rute satu dimulai dari kampung warna warni kemudian kampung kicimpring dilanjutkan ke kebun strawberry, kebun teh dan kebun strawberry dan yang terakhir adalah galeri seni kriya untuk memperlihatkan cinderamata.
    - Rute 2: rute kedua dimulai langsung dari pintu gerbang masuk via Desa Buninagara dan dilanjutkan untuk wisata spiritual Situs Gunung Padang.
    - Rute 3: rute ketiga dimulai dari padepokan kasepuhan ajar padang, kemudian dilanjutkan ke Situs Gunung Padang yaitu wisata spiritual via Desa Rawabogo.

**Gambar 5.** Peta Rute Wisata Kawasan Pariwisata Rawabogo

Sumber : Hasil analisis, 2022



#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komponen pariwisata, Kawasan Pariwisata Rawabogo memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis perencanaan kolaboratif. Potensi tersebut mencakup berbagai daya tarik wisata alam, antara lain Sirah Cai Rawabogo, kebun kopi, kebun teh, kebun stroberi, serta Situs Gunung Padang yang memiliki keunikan berupa formasi batuan. Selain itu, terdapat daya tarik wisata budaya berupa tradisi hajat buruan, hajat lembur, ritual miasih kabumi nagara padang, dan padepokan kasepuhan ajar padang. Kawasan ini juga didukung oleh daya tarik khusus, yaitu Kampung Kicimpring dan Kampung Warna-Warni.

Berdasarkan hasil analisis proses collaborative planning dalam pengembangan desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo berdasarkan 5 kriteria yang merujuk pada konsep (Ansell & Gash, 2008) yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara bahwa proses kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo hanya sampai kepada tahap membangun kepercayaan namun pada tahap membangun kepercayaan juga hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rawabogo yang tidak disadari oleh stakeholders lain yaitu lebih ke bentuk aksi seperti mengadakan acara adat budaya. Dikarenakan untuk proses kolaborasi di Kawasan Pariwisata Rawabogo sendiri tidak berjalan yang artinya tidak ada proses kolaborasi untuk melakukan pertemuan antar stakeholders di Kawasan Pariwisata Rawabogo hanya dilaksanakan pada saat acara yang biasa dilaksanakan yaitu "Miasih Ka Bumi" yang dilaksanakan di Gunung Padang setahun sekali. Pada pertemuan tersebut stakeholders tidak membicarakan dan duduk bersama untuk membicarakan terkait pengelolaan/pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo yang menimbulkan belum secara sinergi dalam satu pintu mengelola potensi wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Rawabogo terutama adalah Situs Gunung Padang yang terletak di Desa Buninagara dan Desa Rawabogo serta belum siap untuk dikembangkan dikarenakan lokasi Situs Gunung Padang berada pada lahan perhutani.

Berdasarkan hasil analisis potensi pengembangan desa wisata berbasis collaborative planning di Kawasan Pariwisata Rawabogo terdapat beberapa masukan yang dapat diterapkan beberapa diantaranya yaitu Pemerintah Desa Rawabogo dan Desa Buninagara adalah berperan dalam penyedia akses dan infrastruktur berkaitan dengan kepariwisataan; memfasilitasi bidang industri dan perdagangan memfasilitasi bidang pertanian, mengadakan koordinasi diantara kedua desa dan juga adanya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Rawabogo. Untuk Kelompok Penggerak Pariwisata yaitu membangun koordinasi antara pemerintah, kelompok penggerak pariwisata, masyarakat dan akademisi dengan peningkatan kapasitas lembaga desa wisata di Kawasan Pariwisata Rawabogo, menganalisis beberapa rencana untuk bekerja sama dengan atraksi daya tarik wisata yang berada di sekitar Kawasan Pariwisata Rawabogo.

Peran masyarakat antara lain diwujudkan melalui penyediaan lahan parkir bagi kendaraan roda dua dan roda empat milik wisatawan, sekaligus bertugas sebagai pengelola dan penjaga parkir di Kawasan Pariwisata Rawabogo. Sementara itu, peran

akademisi meliputi pemberian edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar daya tarik wisata, mengenai pentingnya sektor pariwisata serta manfaat pembangunan pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kawasan Pariwisata Rawabogo. Selain itu, akademisi berperan dalam penyusunan rute wisata untuk mendorong pengembangan kawasan, dengan pembagian kunjungan antara Desa Buninagara dan Desa Rawabogo, yaitu wisata spiritual di Desa Buninagara serta wisata alam dan wisata khusus di Desa Rawabogo, yang sekaligus berkaitan dengan mekanisme pembagian manfaat ekonomi antar kedua desa.

## Referensi

### A. Buku Teks dan Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Astawa, I. P., Triyuni, N. N., & Santosa, I. (2018). Sustainable tourism and harmonious culture: a case study of cultic model at village tourism. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1), 12057.
- Atmoko, T. P. H., 2014. Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata*, 12(2), 146–154.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159–175.
- Handayani, T., & Rahmi, M. (2018). Analisis Kesiapan Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten Sebagai Desa Wisata Syariah. *IKRAITHEKONOMIKA*, 1(2), 1–12.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, September, 63. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2019.v06.i01.p04>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>.
- Maturbongs, E., Suwitri, S., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2019). Internalization of Value System in Mineral Materials Management Policies Instead of Metal And Rocks in Merauke District. *Prizren Social Science Journal*, 3(2), 32.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(02).

- Permana, C. T. H., & Agustine, V. (2022). Perencanaan kolaboratif dalam penyediaan air bersih di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Kecamatan Batununggal, Kota Bandung). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah ...*, 17. <https://doi.org/10.20961/region.v17i1.55553>
- Prasetya, D., & Ansar, Z. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism Pada Kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(1), 60–72. <https://doi.org/10.24252/planomadani.6.1.6>.
- Sesotyaningtyas, M., & Manaf, A. (2015). Analysis of sustainable tourism village development at Kutoharjo Village, Kendal Regency of Central Java. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 184, 273–280.
- Setiadi, H. (2014). *Dasar-dasar Teori Perencanaan*. Modul 1 Dasar-Dasar Teori Perencanaan, 1–47.
- Sugiarto, B. A. T, Siswantara, Y. (2012). Rumah Budaya Sebagai Ruang Publik Untuk Mengembangkan Kegiatan Kepariwisata Di Desa Wisata Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/download/189/174>.
- Sukirman, O., 2017. Apakah Anggaran Pemasaran Pariwisata Pemerintah Efektif dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan? (Studi Kasus di Indonesia Tahun 2011-2016). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, 7(2), 121–128.
- Utami, M. M., Taufik, H. E. R., & Bhakti, W. N. (2019). Village Tourism: The Implementation of Community-Based Tourism. 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019), 537–542.
- Verdiana, A. and Indratno, I. (2021) 'Pemaknaan Potensi Lokal di Desa Wisata Rawabogo Kabupaten Bandung', *Journal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1(1), pp. 72–80.
- Zolfani, S. H., Sedaghat, M., Maknoon, R., & Zavadskas, E. K. (2015). Sustainable tourism: a comprehensive literature review on frameworks and applications. *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, 28(1), 1–30.

## **B. Dokumen dan Peraturan**

- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.

# Analisis Pemberitaan Smart City Kota Jambi Berdasarkan Dimensi Smart City

## Analysis Of Media Coverage Of The Smart City In Jambi Based On Smart City Dimensions

Rifaldi Irawan<sup>1\*</sup>, Dinda Syufradian Putra<sup>2</sup>, Arissy Jorgi Sutan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

### Info Artikel

Artikel Masuk : 04/01/2026

Artikel Diterima : 13/05/2026

Tersedia Online : 13/05/2026

### Kata kunci :

*Smart city,  
Pemberitaan Media,  
NVivo, dan  
Kota Jambi*

### Keyword :

*Smart city,  
Media Coverage,  
NVivo, and  
Jambi City*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kecenderungan pemberitaan media daring mengenai implementasi smart city di Kota Jambi berdasarkan enam dimensi utama: smart governance, smart mobility, smart economy, smart environment, smart people, dan smart living. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi, penelitian ini mengkaji 42 berita yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Data diolah menggunakan teknik coding dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi dominasi isu dalam pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh dimensi smart governance, terutama pada aspek akuntabilitas dan pelayanan publik berbasis teknologi. Dimensi lain memiliki fokus yang lebih spesifik namun terbatas, seperti pengelolaan lalu lintas pada smart mobility, aktivitas bisnis masyarakat pada smart economy, pengelolaan sampah pada smart environment, pengembangan pendidikan pada smart people, serta inklusi sosial pada smart living. Temuan ini mengindikasikan bahwa representasi smart city di Kota Jambi masih berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, sementara dimensi lainnya belum mendapat perhatian yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif agar pengembangan kota cerdas dapat mencakup seluruh dimensi pembangunan perkotaan secara berkelanjutan.

### Abstract

*This study analyzes trends in online media coverage of smart city implementation in Jambi City based on six key dimensions: smart governance, smart mobility, smart economy, smart environment, smart people, and smart living. Using a qualitative approach with content analysis, this study examined 42 news articles collected through documentation. The data were processed using coding techniques with the assistance of NVivo 12 software to identify dominant issues in the news coverage. The results indicate that coverage is dominated by the smart governance dimension, particularly regarding accountability and technology-based public services. Other dimensions have more specific yet limited focuses, such as traffic management in smart mobility, community business activities in the smart economy, waste management in the smart environment, educational development in smart people, and social inclusion in smart living. These findings indicate that the representation of the smart city in Jambi City remains focused on strengthening government governance, while other dimensions have not received balanced attention. Therefore, more comprehensive policies are needed so that smart city development can encompass all dimensions of sustainable urban development.*

<sup>1</sup> rifaldiirawan0421@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam pengelolaan wilayah perkotaan di berbagai negara. Urbanisasi yang semakin pesat menyebabkan kota-kota di dunia menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, meningkatnya kebutuhan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kota untuk mengembangkan pendekatan baru dalam pengelolaan perkotaan yang lebih inovatif, efektif, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat dalam konteks ini adalah konsep smart city. Konsep smart city semakin banyak diadopsi sebagai strategi pembangunan perkotaan untuk merespons tantangan urbanisasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Smart city dipahami sebagai kota yang memanfaatkan data, teknologi digital, serta sumber daya lainnya secara optimal untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan kota, penyediaan layanan publik, keterlibatan warga, dan akuntabilitas pemerintahan melalui integrasi sistem fisik, digital, dan manusia (World Bank 2023)(Nam and Pardo 2011). Dalam perspektif ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun sistem tata kelola kota yang lebih responsif, transparan, dan efisien (Maisarah, Fonna, and Firdaus 2025). Lebih lanjut, smart city juga dipahami sebagai upaya untuk menciptakan kota yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan smart city tidak hanya berorientasi pada digitalisasi layanan publik, tetapi juga mencakup berbagai aspek pembangunan perkotaan (Barbhuiya and Kumala 2017) seperti pengembangan ekonomi, pengelolaan lingkungan, mobilitas perkotaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, implementasi smart city membutuhkan integrasi antara teknologi, kebijakan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan kota yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Albino, Berardi, and Dangelico 2015). Dalam kajian akademik, keberhasilan implementasi smart city umumnya diukur melalui beberapa dimensi utama yang menggambarkan berbagai aspek pembangunan kota secara komprehensif. Salah satu kerangka yang paling banyak digunakan dalam penelitian smart city adalah model yang dikembangkan oleh Rudolf Giffinger yang membagi smart city ke dalam enam dimensi utama, yaitu smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart governance (Giffinger 2007)(Caragliu, Bo, and Nijkamp 2009) efek. Keenam dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem pembangunan perkotaan yang terintegrasi. Smart economy berkaitan dengan pengembangan kegiatan ekonomi berbasis inovasi, smart mobility menekankan pada sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi, smart environment berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, smart people berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, smart living berhubungan dengan kualitas hidup Masyarakat (Gil-Garcia, Pardo, and Nam 2015), sedangkan smart governance menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipasi(Pereira et al. 2019).

Kerangka enam dimensi smart city tersebut menjadi acuan penting bagi berbagai kota di dunia dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis teknologi. Melalui integrasi keenam dimensi tersebut, pemerintah kota diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan kota yang lebih efektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan perkotaan modern, keberhasilan smart city tidak hanya diukur dari tingkat penggunaan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota. Di Indonesia, implementasi konsep smart city mulai berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Program Gerakan Menuju 100 Smart City sejak tahun 2017 sebagai upaya untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi berbasis teknologi dalam pengelolaan kota (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2022). Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang masterplan smart city yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Melalui program tersebut, berbagai kota di Indonesia mulai mengembangkan berbagai inovasi digital dalam pelayanan publik, pengelolaan data pemerintahan, serta penyediaan infrastruktur teknologi informasi. Beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya bahkan telah dikenal sebagai pelopor implementasi smart city di Indonesia melalui berbagai inovasi digital yang diterapkan dalam pengelolaan kota. Keberhasilan kota-kota tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, tingkat perkembangan implementasi smart city di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar daerah. Beberapa kota telah mampu mengintegrasikan teknologi digital secara luas dalam berbagai sektor pembangunan, sementara kota-kota lainnya masih berada pada tahap awal pengembangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahayani 2024) menunjukkan bahwa implementasi smart city di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem berbasis teknologi.

Kondisi tersebut juga terlihat pada beberapa kota yang belum sepenuhnya mampu mengembangkan seluruh dimensi smart city secara seimbang. Misalnya, beberapa kota cenderung lebih fokus pada pengembangan layanan digital pemerintahan (e-government) yang berkaitan dengan dimensi smart governance, sementara dimensi lain seperti smart economy, smart people, maupun smart living belum mendapatkan perhatian yang sama. Ketidakeimbangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi smart city tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (Viola and Fitrianto 2022). Sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Pulau Sumatera, Kota Jambi juga mulai mengadopsi konsep smart city dalam pembangunan perkotaannya. Kota Jambi telah ditetapkan sebagai salah satu kota yang mengikuti Program Gerakan Menuju 100 Smart City sejak tahun 2017. Selain itu,

pemerintah daerah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi dasar kebijakan dalam pengembangan smart city di wilayah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengembangkan layanan publik berbasis digital, meningkatkan sistem informasi pemerintahan, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, perkembangan implementasi smart city di Kota Jambi masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa capaian implementasi smart city di Kota Jambi masih didominasi oleh aspek tata kelola pemerintahan atau smart governance, terutama melalui pengembangan berbagai aplikasi pelayanan publik berbasis digital serta peningkatan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sementara itu, dimensi lain seperti smart people, smart economy, dan smart living masih belum berkembang secara optimal (Maulana, Yanti, and Sukmawati 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi smart city di Kota Jambi masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek pembangunan perkotaan agar dapat berjalan secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Selain implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, perkembangan smart city juga banyak diberitakan oleh media massa. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai program, kebijakan, serta capaian pemerintah dalam pembangunan kota berbasis teknologi (Meijer and Bolívar 2016). Pemberitaan media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga dapat membentuk persepsi publik mengenai keberhasilan maupun tantangan dalam implementasi smart city. Oleh karena itu, analisis terhadap pemberitaan media menjadi penting untuk memahami bagaimana isu-isu terkait smart city direpresentasikan dalam ruang publik.

Dalam konteks penelitian kebijakan publik, media massa sering dipandang sebagai salah satu sumber informasi yang dapat menggambarkan dinamika kebijakan yang terjadi di suatu daerah. Melalui analisis terhadap pemberitaan media, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai isu yang mendapat perhatian publik serta memahami bagaimana kebijakan pemerintah dipersepsikan oleh masyarakat. Pendekatan ini menjadi relevan dalam penelitian mengenai smart city karena media sering kali menjadi sarana utama dalam menyampaikan berbagai inovasi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan mengenai implementasi smart city di Kota Jambi berdasarkan enam dimensi smart city, yaitu smart governance, smart mobility, smart economy, smart environment, smart people, dan smart living. Analisis dilakukan terhadap sejumlah berita yang dipublikasikan oleh media daring dengan menggunakan teknik coding untuk mengidentifikasi kecenderungan isu serta dimensi smart city yang paling dominan dalam pemberitaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai representasi implementasi smart city di Kota Jambi dalam pemberitaan media, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan smart city yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## 2. Data Dan Metode

### 2.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Albi Anggito 2018) dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji pemberitaan mengenai implementasi smart city di Kota Jambi. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam teks berita sehingga dapat menggambarkan kecenderungan isu yang muncul dalam pemberitaan terkait smart city. Sumber data dalam penelitian ini berupa 42 berita yang membahas tentang smart city di Kota Jambi yang dipublikasikan oleh media daring. Berita tersebut dikumpulkan melalui penelusuran pada berbagai portal berita online dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan "smart city", "kota cerdas", serta "program digitalisasi Kota Jambi". Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengunduh, dan mengarsipkan berita yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik coding dengan bantuan perangkat lunak Nvivo 12 (suripto 2023). Proses coding dilakukan dengan mengklasifikasikan isi berita ke dalam kategori berdasarkan enam dimensi smart city menurut smart (Giffinger 2007), yaitu smart governance, smart mobility, smart economy, smart environment, smart people, dan living. Setiap berita dianalisis untuk mengidentifikasi tema, isu, serta dimensi smart city yang muncul dalam pemberitaan. Selanjutnya, hasil coding dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk melihat kecenderungan dimensi smart city yang paling dominan diberitakan dalam media serta untuk menggambarkan bagaimana implementasi smart city di Kota Jambi direpresentasikan dalam pemberitaan media daring.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Smart Governance

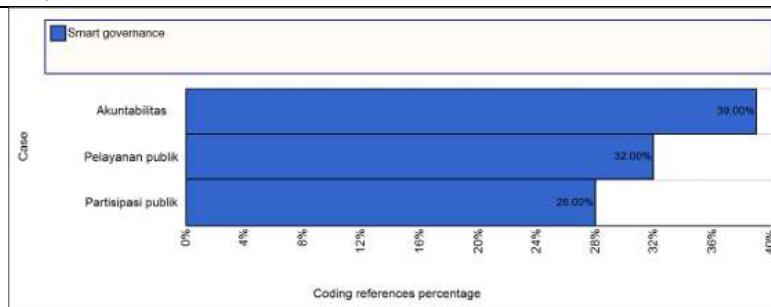
Smart governance merupakan salah satu dimensi dalam konsep smart city yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan kota cerdas, smart governance menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat keterbukaan informasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Penerapan konsep ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Konsep smart governance menjadi bagian dari kerangka smart city yang dikemukakan oleh Rudolf Giffinger yang membagi smart city ke dalam enam dimensi utama, yaitu smart governance, smart mobility, smart economy, smart environment, smart people, dan smart living. Dalam kerangka tersebut, smart governance memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah mengelola pembangunan kota melalui kebijakan, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, dimensi smart governance dianalisis melalui pemberitaan media mengenai

implementasi smart city di Kota Jambi. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam pemberitaan media. Berdasarkan hasil coding terhadap pemberitaan tersebut, dimensi smart governance kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator utama yang berkaitan dengan akuntabilitas, partisipasi publik, dan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung implementasi smart city di Kota Jambi.

**Gambar 1.** Coding reference percentage smart governance

Sumber : Hasil analisis, 2025



Berdasarkan hasil analisis coding terhadap 42 berita, dimensi smart governance menunjukkan variasi distribusi pada tiga indikator utama, yaitu akuntabilitas, pelayanan publik, dan partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas memiliki persentase tertinggi sebesar 39%, diikuti oleh pelayanan publik sebesar 32%, dan partisipasi publik sebesar 28%. Tingginya persentase akuntabilitas (39%) menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai smart city di Kota Jambi lebih banyak menyoroti upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kesuma, Yulianto, and Dwi S 2023). Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang menekankan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, seperti digitalisasi sistem administrasi, pemanfaatan aplikasi pelayanan, serta penguatan sistem informasi pemerintah daerah. Kehadiran berbagai inovasi digital tersebut menunjukkan bahwa implementasi smart city di Kota Jambi berorientasi pada peningkatan transparansi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Sementara itu, indikator pelayanan publik sebesar 32% menunjukkan bahwa pemberitaan media juga cukup banyak menyoroti berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Program digitalisasi layanan administrasi, pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat, serta peningkatan efisiensi pelayanan menjadi beberapa aspek yang sering muncul dalam pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi smart city di Kota Jambi tidak hanya berfokus pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, indikator partisipasi publik memiliki persentase sebesar 28%, yang merupakan nilai terendah dibandingkan dua indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan smart city di Kota Jambi masih relatif terbatas. Rendahnya persentase tersebut dapat mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan program, maupun evaluasi kebijakan smart city belum menjadi fokus utama dalam pemberitaan media.

Kondisi ini juga dapat menggambarkan bahwa implementasi smart governance di Kota Jambi masih lebih menekankan pada penguatan sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi dibandingkan dengan penguatan partisipasi masyarakat secara langsung. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa implementasi smart governance di Kota Jambi cenderung lebih menekankan aspek akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik, sementara aspek partisipasi masyarakat masih relatif kurang menonjol dalam pemberitaan media. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan smart city di Kota Jambi masih berada pada tahap penguatan sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, yang selanjutnya perlu diimbangi dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota cerdas.

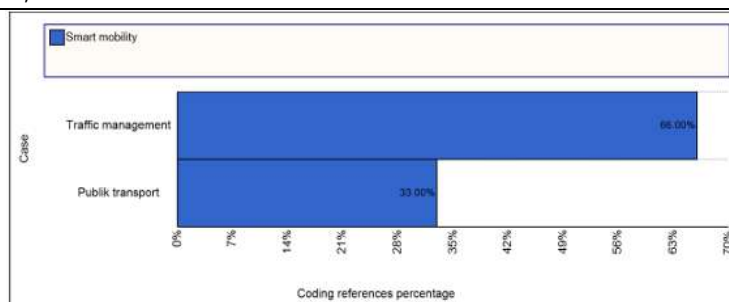
### 3.2. Smart Mobility

Smart mobility merupakan salah satu dimensi dalam konsep smart city yang berkaitan dengan pengembangan sistem transportasi dan mobilitas perkotaan yang efisien, aman, serta berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan kota cerdas, smart mobility menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas sistem transportasi serta mempermudah pergerakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pengembangan sistem mobilitas yang terintegrasi diharapkan mampu mengurangi berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan akses transportasi publik, serta ketidakefisienan sistem transportasi. Dimensi smart mobility juga menjadi bagian dari kerangka smart city yang dikemukakan oleh Rudolf Giffinger yang membagi smart city ke dalam enam dimensi utama. Dalam kerangka tersebut, smart mobility berperan penting dalam mendukung konektivitas perkotaan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan transportasi yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

Dalam penelitian ini, dimensi smart mobility dianalisis melalui pemberitaan media yang berkaitan dengan implementasi smart city di Kota Jambi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan media terkait mobilitas perkotaan. Berdasarkan hasil coding terhadap pemberitaan tersebut, dimensi smart mobility kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator utama yang menggambarkan bagaimana upaya pengembangan sistem transportasi dan mobilitas kota direpresentasikan dalam pemberitaan media mengenai smart city di Kota Jambi.

**Gambar 2.** Coding reference percentage smart mobility

Sumber : Hasil analisis, 2025



Berdasarkan hasil analisis coding terhadap pemberitaan smart city di Kota Jambi, dimensi smart mobility menunjukkan dua indikator utama yaitu traffic management dan public

transport. Hasil analisis crosstab query menunjukkan bahwa indikator traffic management memiliki persentase paling dominan sebesar 66%, sedangkan indikator public transport memiliki persentase sebesar 33%. Dominannya indikator traffic management (66%) menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai smart mobility di Kota Jambi lebih banyak menyoroti upaya pemerintah daerah dalam mengelola lalu lintas serta meningkatkan efisiensi mobilitas perkotaan. Berbagai pemberitaan media menampilkan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, peningkatan infrastruktur jalan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem transportasi yang lebih tertata. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility di Kota Jambi masih banyak difokuskan pada pengelolaan lalu lintas sebagai upaya mengatasi permasalahan mobilitas perkotaan seperti kemacetan dan ketidakteraturan arus kendaraan (Sifa Novwidia Agni et al. 2021).

Sementara itu, indikator public transport memiliki persentase sebesar 33%, yang menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai transportasi publik masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan isu manajemen lalu lintas. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengembangan transportasi publik berbasis konsep smart mobility di Kota Jambi belum menjadi fokus utama dalam pemberitaan media. Program pengembangan transportasi umum yang terintegrasi dan berbasis teknologi masih relatif terbatas dibandingkan dengan upaya pengelolaan lalu lintas yang lebih sering diberitakan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility di Kota Jambi dalam pemberitaan media lebih banyak menekankan pada aspek pengelolaan lalu lintas dibandingkan dengan pengembangan transportasi publik. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan mobilitas perkotaan masih berfokus pada pengaturan arus kendaraan dan infrastruktur jalan, sementara pengembangan sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut dalam kerangka pembangunan smart city.

### 3.3. Smart Economy

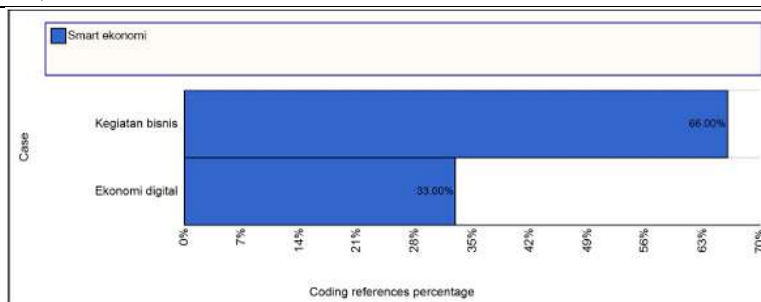
Smart economy merupakan salah satu dimensi dalam konsep smart city yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang inovatif, produktif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks pembangunan kota cerdas, smart economy menekankan pada upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sektor usaha, serta penciptaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan.

Dimensi smart economy juga menjadi bagian dari kerangka smart city yang dikemukakan oleh Rudolf Giffinger yang membagi smart city ke dalam enam dimensi utama. Dalam kerangka tersebut, smart economy berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi, penguatan sektor usaha, serta peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, dimensi smart economy dianalisis melalui pemberitaan media yang berkaitan dengan implementasi smart city di Kota Jambi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan media terkait aktivitas

ekonomi dan pengembangan sektor usaha. Berdasarkan hasil coding terhadap pemberitaan tersebut, dimensi smart economy kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator utama yang menggambarkan bagaimana perkembangan ekonomi dalam konteks smart city direpresentasikan dalam pemberitaan media mengenai pembangunan Kota Jambi.

**Gambar 3.** Coding reference percentage smart economy

Sumber : Hasil analisis, 2025



Berdasarkan hasil analisis coding terhadap pemberitaan smart city di Kota Jambi, dimensi smart economy dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu kegiatan bisnis dan ekonomi digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator kegiatan bisnis memiliki persentase sebesar 66%, sedangkan indikator ekonomi digital memiliki persentase sebesar 33%. Dominannya indikator kegiatan bisnis (66%) menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai smart economy di Kota Jambi lebih banyak menyoroti aktivitas ekonomi masyarakat serta perkembangan sektor usaha di daerah tersebut. Berbagai pemberitaan media menampilkan informasi mengenai pertumbuhan usaha lokal, pengembangan UMKM, serta berbagai kegiatan ekonomi yang didorong oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan smart economy di Kota Jambi dalam pemberitaan media masih banyak berfokus pada penguatan sektor bisnis dan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.

Sementara itu, indikator ekonomi digital memiliki persentase sebesar 33%, yang menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas bisnis secara umum. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa transformasi menuju ekonomi digital di Kota Jambi masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam pemberitaan media. Pemanfaatan platform digital, transaksi elektronik, serta pengembangan bisnis berbasis teknologi masih memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan dalam kerangka pembangunan smart city. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa implementasi smart economy di Kota Jambi dalam pemberitaan media lebih banyak menyoroti kegiatan bisnis konvensional dibandingkan dengan perkembangan ekonomi digital. Kondisi ini menggambarkan bahwa penguatan sektor usaha masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi daerah, sementara integrasi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat.

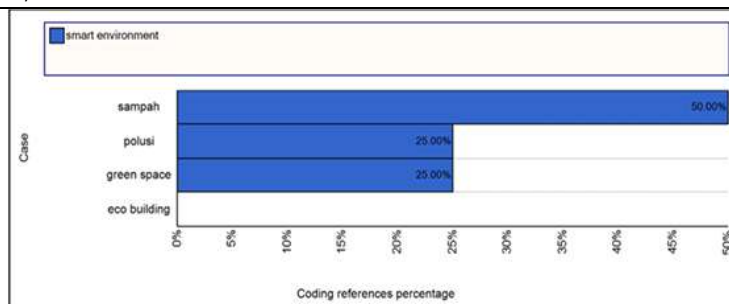
### 3.4. Smart Environment

Smart environment merupakan salah satu dimensi dalam konsep smart city yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi serta kebijakan yang ramah lingkungan. Dalam konteks pembangunan kota cerdas, dimensi ini menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya secara efisien, pengurangan pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Penerapan konsep ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dimensi smart environment juga menjadi bagian dari kerangka smart city yang dikemukakan oleh Rudolf Giffinger yang membagi smart city ke dalam enam dimensi utama. Dalam kerangka tersebut, smart environment berperan penting dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berbasis teknologi.

Dalam penelitian ini, dimensi smart environment dianalisis melalui pemberitaan media yang berkaitan dengan implementasi smart city di Kota Jambi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan media terkait pengelolaan lingkungan perkotaan. Berdasarkan hasil coding terhadap pemberitaan tersebut, dimensi smart environment kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator utama yang menggambarkan bagaimana isu-isu lingkungan dalam konteks smart city direpresentasikan dalam pemberitaan media mengenai pembangunan Kota Jambi.

**Gambar 4.** Coding reference percentage smart environment

Sumber : Hasil analisis, 2025



Berdasarkan hasil analisis coding terhadap pemberitaan mengenai smart city di Kota Jambi, dimensi smart environment dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu pengelolaan sampah, polusi, ruang terbuka hijau (green space), dan eco building. Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator pengelolaan sampah memiliki persentase tertinggi sebesar 50%, sedangkan indikator polusi dan green space masing-masing memiliki persentase sebesar 25%, dan indikator eco building tidak ditemukan dalam pemberitaan yang dianalisis. Dominannya indikator pengelolaan sampah (50%) menunjukkan bahwa isu lingkungan yang paling banyak diberitakan dalam konteks smart environment di Kota Jambi berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hal ini mencerminkan bahwa perhatian pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap permasalahan sampah cukup tinggi, mengingat pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan

utama dalam pembangunan perkotaan. Pemberitaan media banyak menyoroti berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah, baik melalui program kebersihan lingkungan, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, maupun partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota.

Sementara itu, indikator polusi dan green space masing-masing sebesar 25%, yang menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut juga menjadi bagian dari perhatian dalam pembangunan lingkungan perkotaan, meskipun intensitas pemberitaannya tidak sebesar isu pengelolaan sampah. Pemberitaan mengenai polusi umumnya berkaitan dengan kualitas lingkungan perkotaan serta upaya pengendalian dampak aktivitas perkotaan terhadap lingkungan. Sedangkan pemberitaan mengenai green space berkaitan dengan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Di sisi lain, indikator eco building tidak ditemukan dalam pemberitaan yang dianalisis, yang menunjukkan bahwa aspek pembangunan bangunan ramah lingkungan belum menjadi fokus utama dalam pemberitaan mengenai smart city di Kota Jambi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan melalui penerapan bangunan ramah lingkungan masih belum banyak diimplementasikan ataupun belum menjadi perhatian utama dalam diskursus pembangunan kota. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemberitaan media, dimensi smart environment di Kota Jambi lebih banyak menyoroti isu pengelolaan sampah dibandingkan dengan aspek lingkungan lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan sampah masih menjadi fokus utama dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, sementara aspek lain seperti pengendalian polusi, pengembangan ruang terbuka hijau, dan pembangunan bangunan ramah lingkungan masih memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan dalam kerangka pembangunan smart city.

### 3.5. Smart People

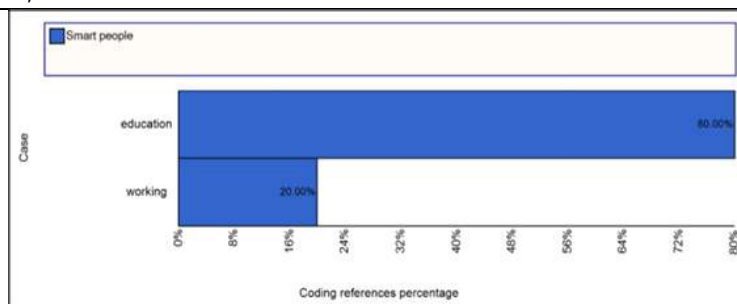
Smart people merupakan salah satu dimensi dalam konsep smart city yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan kota yang cerdas. Dimensi ini menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks pembangunan kota cerdas, masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang baik diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berbasis teknologi dan inovasi. Dimensi smart people juga menjadi bagian dari kerangka smart city yang dikemukakan oleh Rudolf Giffinger yang membagi smart city ke dalam enam dimensi utama. Dalam kerangka tersebut, smart people berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kota serta memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, dimensi smart people dianalisis melalui pemberitaan media yang berkaitan dengan implementasi smart city di Kota Jambi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan media terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil coding terhadap pemberitaan tersebut, dimensi smart people kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator utama yang menggambarkan bagaimana isu-isu terkait pendidikan, kesehatan, serta pengembangan kapasitas masyarakat direpresentasikan dalam pemberitaan media mengenai pembangunan Kota Jambi.

**Gambar 5.** Coding reference percentage smart people

Sumber : Hasil analisis, 2025



Berdasarkan hasil analisis coding terhadap pemberitaan mengenai smart city di Kota Jambi, dimensi smart people dianalisis melalui dua indikator utama yaitu education (pendidikan) dan working (pekerjaan). Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator education memiliki persentase sebesar 80%, sedangkan indikator working memiliki persentase sebesar 20%. Dominannya indikator education (80%) menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam konteks smart city di Kota Jambi lebih banyak menyoroti aspek pendidikan. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan kota cerdas. Berbagai pemberitaan media banyak menampilkan informasi mengenai program pendidikan, peningkatan kualitas sekolah, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Sementara itu, indikator working hanya memiliki persentase sebesar 20%, yang menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai aspek pekerjaan atau kesempatan kerja dalam konteks smart people relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sektor pendidikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa isu ketenagakerjaan dalam kerangka smart city belum menjadi fokus utama dalam pemberitaan media, atau belum banyak dikaitkan secara langsung dengan konsep smart people. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemberitaan media, dimensi smart people di Kota Jambi lebih banyak menyoroti pengembangan pendidikan dibandingkan dengan aspek ketenagakerjaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dipandang sebagai langkah penting dalam mendukung terwujudnya konsep smart city, sementara pengembangan aspek ketenagakerjaan masih memiliki ruang yang cukup besar untuk diperkuat dalam mendukung pembangunan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

### 3.6. Smart Living

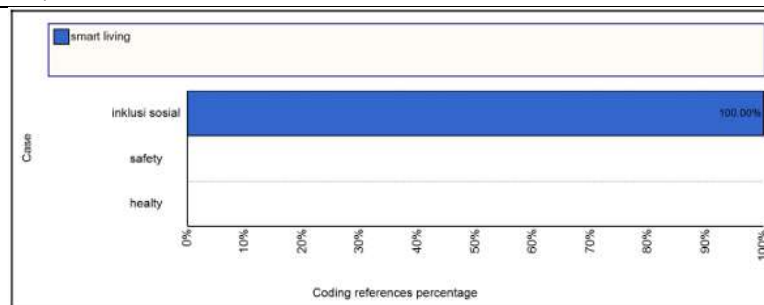
Smart living merupakan salah satu dimensi dalam konsep smart city yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik

yang memadai, lingkungan yang aman, serta layanan perkotaan yang nyaman dan berkelanjutan. Dimensi ini menekankan pada bagaimana teknologi dan kebijakan publik dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat perkotaan. Dengan adanya penerapan konsep smart living, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan kota secara langsung melalui peningkatan kualitas layanan publik serta kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dimensi smart living juga menjadi bagian dari kerangka smart city yang dikemukakan oleh Rudolf Giffinger yang membagi smart city ke dalam enam dimensi utama. Dalam kerangka tersebut, smart living berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan perkotaan seperti fasilitas umum, keamanan lingkungan, kesehatan, serta kualitas ruang hidup yang lebih baik. Dalam penelitian ini, dimensi smart living dianalisis melalui pemberitaan media yang berkaitan dengan implementasi smart city di Kota Jambi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan media terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil coding terhadap pemberitaan tersebut, dimensi smart living kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator utama yang menggambarkan bagaimana berbagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat direpresentasikan dalam pemberitaan media mengenai pembangunan Kota Jambi.

**Gambar 6.** Coding reference percentage smart living

Sumber : Hasil analisis, 2025



Berdasarkan hasil analisis coding terhadap pemberitaan mengenai smart city di Kota Jambi, dimensi smart living dianalisis melalui tiga indikator utama yaitu healthy (kesehatan), inklusi sosial, dan safety (keamanan). Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator inklusi sosial memiliki persentase sebesar 100%, sedangkan indikator healthy dan safety tidak menunjukkan adanya coding referensi pada pemberitaan yang dianalisis. Tingginya persentase pada indikator inklusi sosial menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai smart living di Kota Jambi lebih banyak menyoroti aspek kehidupan sosial masyarakat. Dalam berbagai pemberitaan, isu yang muncul umumnya berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih terbuka, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pembangunan kota. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kehidupan sosial yang inklusif menjadi salah satu hal yang cukup sering dikaitkan dengan konsep smart city dalam pemberitaan media.

Di sisi lain, indikator *healthy dan safety* tidak muncul dalam hasil coding. Artinya, dalam berita yang dianalisis tidak ditemukan pembahasan yang secara langsung mengaitkan aspek kesehatan masyarakat maupun keamanan lingkungan dengan dimensi *smart living*. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut belum banyak dibahas dalam pemberitaan yang berkaitan dengan *smart city* di Kota Jambi. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa dalam pemberitaan media, dimensi *smart living* di Kota Jambi lebih banyak dikaitkan dengan aspek inklusi sosial. Sementara itu, aspek kesehatan dan keamanan masih jarang muncul dalam pemberitaan yang menghubungkannya dengan konsep *smart city*. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *smart living* dalam media masih lebih menekankan pada kehidupan sosial masyarakat, sedangkan aspek lain yang juga menjadi bagian dari *smart living* masih belum banyak diangkat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis representasi implementasi *smart city* di Kota Jambi dalam pemberitaan media daring masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan fokus antar dimensi pembangunan kota. Secara umum, narasi media didominasi secara signifikan oleh dimensi *smart governance* yang menitikberatkan pada aspek akuntabilitas dan digitalisasi pelayanan publik, sementara dimensi lainnya seperti mobilitas, ekonomi, lingkungan, sumber daya manusia, dan kualitas hidup masih diposisikan sebagai isu pelengkap dengan cakupan yang sangat spesifik dan terbatas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa diskursus publik mengenai kota cerdas di Jambi masih sangat kental dengan perspektif tata kelola pemerintahan berbasis teknologi daripada sebagai transformasi perkotaan yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan publikasi yang lebih integratif guna memastikan seluruh dimensi *smart city* mendapatkan perhatian yang proporsional demi mewujudkan pembangunan kota yang cerdas secara komprehensif dan berkelanjutan.

#### Referensi

##### A. Buku Teks dan Jurnal

- Albi Anggito, J. S. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Albino, Vito, Umberto Berardi, and Rosa Maria Dangelico. 2015. "Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives." *Journal of Urban Technology* 22(1):3–21. doi: 10.1080/10630732.2014.942092.
- Barbhuiya, Salim, and Davin Kumala. 2017. "Behaviour of a Sustainable Concrete in Acidic Environment." *Sustainability (Switzerland)* 9(9). doi: 10.3390/su9091556.
- Caragliu, Andrea, Chiara D. E. L. Bo, and Peter Nijkamp. 2009. "Smart City in Europe." 3rd Central European Conference in Regional Science 18(2):45–59.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. 2022. "Gerakan Menuju 100 Smart City." *Kemkominfo* 1–10. Retrieved (<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/gerakan-menuju-100-smart-city>)  
2/%0Ahttps://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern+et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\_satker).

- Giffinger, R. 2007. "Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities." Research Institute for Housing, Urban and Mobility Services 16(October):1–24.
- Gil-Garcia, J. Ramon, Theresa A. Pardo, and Taewoo Nam. 2015. "What Makes a City Smart? Identifying Core Components and Proposing an Integrative and Comprehensive Conceptualization." *Information Polity* 20(1):61–87. doi: 10.3233/IP150354.
- Kesuma, Arjuna Arief, Arief Sukma Yulianto, and Sapta Dwi S. 2023. "E-Government As A Form Of Smart Governance Implementation At Bandung Smart City." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4(12):2469–80. doi: 10.59141/jist.v4i12.831.
- Mahayani, Ni Made Hintya. 2024. "GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10(3):67–68.
- Maisarah, Putri Ayu, Fadhillah Fonna, and Rayyan Firdaus. 2025. "Peran Kritis Sistem Informasi Manajemen Dalam Mewujudkan E-Government Yang Responsif, Transparan, Dan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan* 6(3).
- Maulana, Rio Yusri, Ovie Yanti, and Nur Sukmawati. 2020. "Overview of Smart City Policy Implementation: A New Approach To Jambi City Government Administration in the Industry 4.0 Era." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4(4). doi: 10.58258/jisip.v4i4.1466.
- Meijer, Albert, and Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. 2016. "Governing the Smart City: A Review of the Literature on Smart Urban Governance." *International Review of Administrative Sciences* 82(2):392–408. doi: 10.1177/0020852314564308.
- Nam, Taewoo, and Theresa A. Pardo. 2011. "Smart City as Urban Innovation: Focusing on Management, Policy, and Context." *ACM International Conference Proceeding Series* 185–94. doi: 10.1145/2072069.2072100.
- Pereira, Gabriela Viale, B. , Peter Paryceka, Enzo Falcoc, and Reinout Kleinhans. 2019. "Smart Governance in the Context of Smart Cities: A Literature Review."
- Sifa Nowwidia Agni, Manzila Izniardi Djomiy, Roki Fernando, and Catur Apriono. 2021. "Evaluasi Penerapan Smart Mobility Di Jakarta." *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi* 10(3):214–20. doi: 10.22146/jnteti.v10i3.1730.
- Suripto. 2023. *Program Aplikasi New Nvivo Untuk Analisis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Viola, Hasna Anugerah, and Achmad Room Fitrianto. 2022. "The Strategy Smart City Development Concepts in Indonesia." *Jurnal Public Policy* 8(1):1. doi: 10.35308/jpp.v8i1.4468.
- World Bank. 2023. *GLOBAL SMART CITY PARTNERSHIP PROGRAM PHASE 2 COMPLETION REPORT*. Washington DC 20433.